



**NAGARI
KAMANG HILIA**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH NAGARI
TAHUN 2017 - 2023**



**KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

Jalan M Saleh Dt Rayo Panghulu, Kamang Hilia
Telp. (0752) 7445205 web : <http://www.nagarikamanghilia.com>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap Jorong dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagari dalam rangka Mengagas Masa Depan Nagari, tim penyusun yang terdiri dari, Sekretaris Nagari, LPMN, Wali Jorong, wakil Masyarakat, wakil perempuan dan Perangkat Nagari Kamang Hilia telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMNag.

RPJMNag adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Kamang Hilia yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Nagari dalam bentuk dokumen perencanaan Nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMNag tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMNag ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMNag ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Kamang Hilia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kamang Hilia, 03 Desember 2018

Tim Penyusun

Pemerintah Nagari kamang Hilia

DAFTAR ISI

COVER	Ha
PERATURAN NAGARI TENTANG RPJMNAG	1
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	2
	3
BAB II : GAMBARAN UMUM NAGARI	
2.1. Sejarah Nagari.....	5
2.2. Kondisi Nagari.....	5
2.2.1 Peta Nagari.....	30
2.2.2. Kondisi geografi dan Topografi Nagari.....	30
2.2.3. Kondisi Sumber Daya Alam.....	31
2.2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia.....	32
2.2.5. Kondisi Sumber Daya Pembangunan.....	34
2.2.6. Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya.....	37
2.3 Pemerintahan Nagari.....	38
2.3.1. Pembagian Wilayah.....	40
2.3.2. Struktur Organisasi Nagari.....	40
	44
BAB III : MASALAH DAN POTENSI	
3.1. Masalah.....	
3.1.1 Permasalahan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	47
3.1.2 Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	47
3.1.3 Permasalahan Bidang Pembinaan Masyarakat....	48
3.1.4 Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	50
3.1.5 Kejadian Tidak Terduga.....	52
3.2. Potensi.....	53
3.2.1 Bidang Pendidikan.....	53

3.2.2 Bidang Agama.....	53
3.2.3 Bidang Kesehatan Lingkungan.....	57
3.2.4 Pemerintah Nagari.....	58
3.2.5 Bidang Perekonomian.....	61
3.2.6 Bidang Pertanian.....	61
3.2.7 Bidang Industri.....	61
3.2.8 Bidang Perdagangan.....	62
3.2.9 Bidang Adat dan Budaya.....	62
3.2.10 Bidang Agama.....	62
3.2.11 Bidang perantau.....	63
	64

**BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI**

4.1. Visi.....	
4.2. Misi.....	65
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari.....	66
4.4. Prioritas Rencana Program Pembangunan Nagari.....	67
	69

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Walinagari tentang Tim Penyusun RPJM Nagari
2. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari
3. Daftar Sumber Daya Alam
4. Daftar Sumber Daya Manusia
5. Daftar Sumber Daya Pembangunan
6. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Nagari
7. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari
8. Daftar gagasan dusun/Kelompok
9. Sketsa Nagari
10. Kalender musim
11. Bagan kelembagaan
12. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
13. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian keadaan Nagari
14. Laporan hasil pengkajian keadaan nagari
15. Berita Acara Musna Penyusunan RPJM, Undangan dan daftar hadir peserta
16. Berita Acara Musrenbang Nagari Penyusunan RPJM Nagari, Undangan dan daftar hadir peserta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah kemandirian, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari

Membangun kemandirian Nagari dalam kerangka Nagari Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Nagari yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Untuk itu maka Pemerintah Nagari perlu menyusun perencanaan nagari dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat nagari.

Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Nagari. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan nagari merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan Nagari yang berskala lokal Nagari bentuk dari perencanaan itu salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.

RPJM Nagari Kamang Hilia ini merupakan rencana strategis Nagari

Kamang Hilia untuk 6 (enam) kedepan guna mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJM Nagari tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang mengacu kepada perencanaan tingkat Kabupaten yang termuat didalam RPJM Kabupaten Agam. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabuoaten dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 56);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah:

1. Merumuskan serta menjabarkan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif 6 (enam) tahun yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama rakyat.
2. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Nagari adalah:

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Menjadi dasar penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBNag, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
3. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

2.1.1 Asal Usul

Tradisi nenek moyang berpindah-pindah tempat untuk mencari pemukiman baru dengan prospek lebih baik, agaknya sudah menjadi

hukum alam dan tuntutan sejarah manusia dimuka bumi. Bukti ini telah di perkuat oleh kisah-kisah perantauan yang terjadi disemua benua, seperti kisah rombongan suku moaden yang bertolak dari sekitar Laut Hitam, Pencilvania dsb, menembus steppe Hongaria yang luas dengan gerobak kayu di tarik kuda, menuju daerah baru di Eropah Barat. Atau juga perantau Columbus dengan kapal layarnya mengarungi lautan demi lautan, yang kemudian menemukan Benua Amerika, serta banyak lagi kisah-kisah lain yang dapat dinilai sebagai pelopor sejarah Dunia dimana kelak melahirkan manusia-manusia pengukir sejarah.

Demikan pula halnya dengan beberapa kisah perantauan yang terjadi di Minangkabau, tepatnya ketika kerajaan yang berpusat di Batu Sangkar itu mulai berkembang sekitar abad ke X. Tuntutan ini ternyata kemudian ikut menciptakan sejarah sebagai hasil dari pengambaran sebahagian penduduknya dalam mencari daerah baru ke berbagai penjuru disekitarnya. Antara lain adalah sejarah satu daerah **YANG SAMPAI SEKARANG BERNAMA KAMANG.**

Secara etimologi asal usul nama Nagari Kamang dapat ditelusuri, dimana menurut Tambo Nagari Kamang yang disesuaikan dengan sejarah Kerajaan Minangkabau, yang mengalami masa jayanya pada abad X Masehi, beberapa kelompok pengembara dari Pagaruyung mencari daerah baru sebagai perluasan wilayah. Mereka turun lewat Tabek Patah terus ke Bukik Lantak tuo, disini mereka memecah menjadi beberapa rombongan kecil. Salah satu rombongan tersebut meneruskan perjalanan menempuh hutan rimba, sampai mereka menemukan sebuah sungai yang mengalir dari barat ketimur, mereka menelusurinya untuk mencari hulunya sampai pada pinggiran sungai yang berbatu-batu mirip terowongan dimana air keluar dari terowongan tersebut. Perjalanan dilanjutkan sampai mereka menemukan air berputar masuk terowongan bawah bukit, disinilah mereka beristirahat dan menyusun kelompok berdasarkan pasukan yang mereka bawa dari pagaruyung yaitu 4 (empat) pasukan adat.

Perjalanan dilanjutkan sampai pada bebatuan yang menjulang tinggi yang mereka namai *Batu Bajolang*, setelah menerima petunjuk dari pimpinan rombongan, mereka menuju sebuah dataran tinggi dimana disanalah tumbuh batang kayu besar bagaikan gobah yang akhirnya daerah ini dinamai *Gobah*. Disinilah mereka mulai menetap dan melaksanakan kegiatan “*mancancang-malateh, manatak jo manaruko*”.

Dibawah batang kayu besar itulah juga dilaksanakan musyawarah untuk segala sesuatu keputusan yang diambil untuk kelangsungan hidup, pimpinan rombongan biasanya meminta pendapat kepada yang hadir dengan pertanyaan “*kamanga wak lai..?*” dengan istilah “*kamanga*” ini kemudian pohon kayu tersebut mereka namai Kayu Kamang, setelah melalui proses sekian lama akhirnya mereka sepakat menamai daerah itu “**Kamang**”. Disinilah dimulai pembentukan suatu Nagari yang dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat Minang yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu.*

Seiring dengan telah dibukanya daerah baru, maka mulai pula masuk rombongan dari daerah lain, diantaranya Sariak Sungai Pua, Canduang, Koto Laweh, Biaro, Sungai Janiah dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan lahan, penyebaran penduduk lebih besar kearah utara dan barat yang ditata dengan hukum adat. Perkembangan selanjutnya mereka membuat kata sepakat untuk menentukan batas dengan cara “*kamananam aua sarumpun diateh tanah nan sabingkah*”, lokasi aur/bulu yang akan ditanami: sebelah timur di bukit baka, sebelah barat di gurun capo, sebelah selatan mulai dari perbatasan salo sampai Parak Rajo (perbatasan dengan Nagari Bukik), sebelah utara dipuncak bukit panjang, adapun Nagari yang ada di sekeliling Nagari Kamang yaitu; Salo, Magek, Bukik dan Suayan. Itulah kawasan yang mereka jadikan sebagai wilayah Nagari;

badusun batarak,
bakorong bakampuang,
basasok bajurami,
balabuah batapian,
basawah baladang,
barumah batanggo,
babalai bamusajik,
bapandam bapakuburan,
Bapadang bagalanggang.

Asal dan keturunan orang yang 4 (empat) niniak ini, sekarang dikenal dan tergabung kedalam 4 (empat) suku, yaitu :

1. Suku adat *Sikumbang*, turun/berasal dari Canduang, menetap di

Kampuang Balai Panjang.

2. Suku adat *Koto*, turun/berasal dari Biaro menetap di Kampuang Rumah Tinggi.
3. Suku adat *Jambak*, turun/berasal dari Kapau menetap di Kampuang Kubang.
4. Suku adat *Pisang*, turun berasal dari Banuhampu menetap di Kampuang Taluak

Dalam tiap-tiap suku ada beberapa pecahan suku adat sebagai berikut :

1. Suku Sikumbang terbagi 3 suku adat :
 - a. Sikumbang *Mansiang*, niniaknya *Dt Marajo* turun dari Canduang.
 - b. Sikumbang *Gadang*, niniaknya *Dt Rajo Pangulu* turun dari Salo
 - c. Sikumbang *Tali Kincia*, niniaknya *Dt Rajo Sikumbang* turun dari Salo
2. Suku Koto terbagi atas 6 suku adat :
 - a. Koto *Rumah Tinggi*, niniaknya dari *Dt Tuo* turun dari Biaro.
 - b. Koto *Rumah Gadang*, niniaknya *Dt Maka* turun dari Biaro
 - c. Koto *Sariak*, niniaknya *Dt Majoindo* turun dari Sariak/Sungai Pua
 - d. Koto *Tibarau*, niniaknya *Dt Singo Rapi* turun dari Ampek Angkek
 - e. Koto *Kepoh*, niniaknya *Dt Sampono Basa* turun dari Ampek Angkek
 - f. Koto *Tangkamang (Koto Nan Batigo)* niniaknya :
 - 1) *Dt Nan Laweh*
 - 2) *Dt Indo Marajo*
 - 3) *Dt Kiraiang*Semuanya turun dari Biaro

Suku Koto disebut juga *Koto Nan Salapan* (koto yang delapan) terdiri dari suku koto *Nan Balimo* dan suku koto *Nan Batigo*.

Suku Jambak terdiri dari 7 suku adat :

- a. Suku Jambak *Kubang*, niniaknya *Dt Palimo* turun dari Kapau
- b. Suku Jambak *Puhun*, niniaknya *Dt Rajo Endah* turun dari Mungka/ 50 Kota
- c. Suku Jambak *Pasia*, niniaknya *Dt Tumangindo* turun dari Sungai Janiah/Baso

- d. Suku Jambak *Kutianyia*, niniaknya *Dt Nan Basa* turun dari Mungka
- e. Suku Jambak *Ujuang Tanjuang*, niniaknya *Dt Bajangguk* turun dari Kubang/Baso
- f. Suku Jambak *Tanjuang Mangkudu*, niniaknya *Dt Bunsu* turun dari Kubang.
- g. Suku Jambak *Tangkamang*, niniaknya *Dt Tan Marajo* turun dari Kubang.

Suku Pisang terdiri dari beberapa suku adat :

- a. Suku *Pisang*, niniaknya *Dt Mangukudun* turun dari Banuhampu
- b. Suku *Guci*, niniaknya *Dt Sati* turun dari Ampek Angkek
- c. Suku *Caniago*, niniaknya *Dt Parpatiah Nan Sabatang* turun dari Banuhampu
- d. Suku *Simabua*, niniaknya *Dt Bagindo* turun dari Tilatang.

Suku adat pisang tersebut diatas, disebut juga suku *Ampek Ibu*, yang kemudian lahirlah suku *Payobada* yang berindukan pada suku Simabua pucuaknya, dan suku *Bodi* yang berindukan Caniago Pucuaknya. Hal ini disebut dalam nagari sebagai Pasukan Ampek Ibu, atau berarti berasal dari 4 orang ibu dahulunya.

2.1.2 Zaman Perang Paderi

Menutup akhir abad ke 18 dan memasuki abad ke 19, adalah masa- masa yang sangat tragis dialami pemerintah kolonial Belanda. Selain perlawanan gigih yang terus menerus diberikan rakyat Indonesia, juga hasil-hasil bumi yang akan di jual ke Pasar Eropa sering dibajak oleh kelompok-kelompok radikal yang sangat kejam, memiliki armada dan persenjataan kuat, sehingga mengakibatkan defisit yang besar di dalam keuangan pemerintah.

Salah satu langkah penting yang di ambil Napoleon waktu itu adalah segera mengirim seorang Belanda berwatak keras bernama Herman William Daendels untuk menjabat Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, sekaligus dalam upaya mempertahankan pulau jawa dari blokade Angkatan Laut Inggris. Namun sebagaimana tertulis dalam sejarah usaha ini sama sekali tidak mampu menolong posisi Belanda yang semakin terjepit, karena sekitar Tahun 1811, Lord Minto Gubernur

Jenderal Inggris di Calcutta India dengan resmi mengumumkan berakhirnya kekuasaan Belanda atas pulau Jawa diganti dengan kekuasaan Inggris.

Sementara itu pihak Inggris yang sudah membuka kantornya di Padang, Air bangis dan pulau Cingkuak, tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan konflik yang sedang berkecamuk antar golongan Agama (Paderi) dengan golongan kaum Adat. Mereka tetap berpijak pada komitmen tidak ingin mencampuri urusan anak negeri karena menganggapnya sangat riskan yang bisa mengancam posisi perseroan dagang Kompeni Hindia Timur Inggris sendiri. Begitu juga halnya manakala kemudian Padang di serahkan kembali pada Belanda pada Bulan Mei 1818 (berdasarkan perjanjian 1814), Du Puy yang memangku jabatan sebagai Residen di Padang, tidak peduli pada suasana disekitarnya, yang penting baginya waktu itu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan mereka.

Mungkin sudah menjadi kodrat bagi daerah permai, tenang dan ditaburi bukit barisan ini untuk terlibat ditengah pergulatan menentang penjajahan sebagai lembaran sejarah nasional. Sepanjang data-data yang diperoleh sekitar tahun 1803 sampai dengan 1827, Nagari Kamang termasuk salah satu pusat pergerakan Kaum Paderi hasil gemblengan tokoh-tokoh Harimau Nan Salapan, dimana untuk wilayah Kamang dikomandoi oleh Taunku Nan Renceh yang semula bertujuan untuk meluruskan kebiasaan kaum adat yang masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

Dalam perkembangannya, saat gejolak pembaharuan memasuki pelosok Alam Minangkabau, Nagari Kamang tidak bisa menghindar dari ajang pertempuran yang saat itu dipimpin oleh ulama bernama Tuanku Bajangguik Hitam. Tuanku Bajangguik Hitam adalah orang Kamang asli yang dilahirkan di dusun Taluak dari pasukan Jambak, dimasa muda beliau hingga menjelang akhir hayat merupakan tokoh santri yang sering berdakwah di Surau Taluak baik kepada masyarakat umum maupun kader Paderi. Selain sebagai tempat ibadah dan tempat menimba ilmu, Surau Taluak menjadi markas komando dari pergerakan Paderi di Nagari Kamang.

Setelah Belanda berhasil menaklukkan beberapa daerah disekitar

Batusangkar dan Solok, mereka mulai menggerakkan militernya dalam rangka ekspansinya ke Agam dengan Kamang sebagai sasaran utama penyerangan, pertempuran ini berlangsung sangat alot dan memakan korban yang tidak sedikit baik dipihak Paderi maupun pihak Belanda. Ada dua faktor yang menyebab hal ini, yaitu 1). Faktor fanatisme/semangat tempur yang tinggi. 2). Strategi tempur yang diterapkan oleh pejuang Paderi yaitu: benteng alam berupa tanaman aur berduri yang tumbuh subur hampir menutupi bahagian selatan Kamang sejak dari batas Nagari Salo sampai ke batas Kamang Mudiak sekarang yang bernama Padang Rajo ditambah dengan adanya parit yang membentang sepanjang perbatasan tersebut, dua hal inilah yang menyulitkan Belanda untuk menembus pertahanan para Paderi serta pejuang Kamang. Untuk bisa menembus benteng hidup para pejuang, Belanda melakukan siasat dengan cara melemparkan uang koin/logam diantara tanaman aur/bambu sehingga tanpa disadari oleh para pejuang masyarakat mulai merambah tanaman aur/bambu tadi untuk mengambil uang logam, dengan demikian benteng pertahanan mulai terbuka sehingga tentara Belanda mulai bisa memasuki wilayah Kamang, puncaknya adalah saat Belanda tidak menemukan Tuanku Bajangguik Itam kemudian mereka membakar markas komando pejuang, yaitu Surau Taluak.

Awal tahun 1832, karena masih sulitnya menguasai pertahanan pejuang Paderi, maka Belanda memulai serangan besar-besaran ke pusat pertahanan Paderi di Agam, untuk menaklukkan Kamang, Belanda menyerang dari 3 (tiga) jurusan yaitu dari Tilatang dipimpin oleh Mayor De Buus, dari Suliki dipimpin oleh Mayor De Quay dan dari arah Salo dipimpin oleh Letkol Elout yang dibantu oleh satu detasemen dibawah pimpinan Mayor Van der Tuuk. Dalam satu pertempuran, akhirnya Tuanku Bajangguik Itam gugur dan pada akhirnya pada bulan Juli 1832 seluruh daerah Agam jatuh dalam kekuasaan Belanda. Bulan Oktober 1832 wilayah Lima Puluh Kota juga dikuasai oleh Belanda ditandai dengan menyerahnya Tuanku Halaban. Setelah menguasai dua wilayah pertahanan Paderi ini Belanda mulai melancarkan serangan ke utara dalam usaha merebut Bonjol, namun baru pada tahun 1837 Belanda bisa menaklukkan Bonjol dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol pada saat perundingan dengan Belanda kemudian beliau diasingkan ke Menado.

2.1.3 Perang Kamang 1908

1. Dikeluarkannya Pungutan Belasting

Si tanah emas adalah sebuah istilah kaum kolonialis dan imperialis terhadap tanah jajahan yang di kuras secara tidak jujur, demi memperkaya diri sendiri. Pada Tahun 1830 Kerajaan Belanda memutuskan mengirim Van Den Bosch seorang ahli ekonomi yang keras untuk menjabat Gubernur Jenderal yang baru di Indonesia, yang kemudian terkenal dengan *Cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa). Dan tidak lama kemudian yaitu pada Tahun 1833, menyusul di berlakukan pula untuk Daerah Sumatera Barat satu peraturan yang baru di kenal dengan sebutan Plakat panjang. Adapun isinya sebagai antara lain:

1. Penduduk di bebaskan dari segala bentuk pajak yang berat;
2. Kerja rodi dihapuskan, diganti dengan tenaga bayaran;
3. Rakyat diwajibkan menanam kopi yang kemudian di jual dengan harga tertentu kepada pemerintah;
4. Belanda tidak akan mencampuri masalah anak negeri dan mengatur pemerintah nagari.

Cultuurstelsel jelas merupakan sebahagian usaha Belanda untuk keluar dari tekanan serius yang mereka hadapi dan memang ternyata untuk sementara mereka berhasil memenuhi tanggung jawab demi perbaikan ekonomi dalam negeri dan arah perkembangan industri yang semakin melangkah maju serta Saldo keuntungan yang masuk sudah lebih dari cukup.

Tetapi pada Tahun 1848, terjadi revolusi besar-besaran di Eropa termasuk Belanda. Undang- Undang Dasar di ubah, dimana parlemen sudah boleh angkat bicara dan melakukan kontrol terhadap kebijakan politik yang di lakukan pemerintah. Dukungan ini kemudian diperkuat setelah munculnya partai-partai yang bertendens liberal, malahan selanjutnya sepak terjang raja dalam pemerintahan dan keuangan boleh di awasi oleh Badan Perwakilan rakyat. Dan raja juga harus memberikan laporan secara priodik mengenai perkembangan wilayah koloni, sebagai pertanggung jawab terhadap parlemen.

Lantas berbagai sorotan mulai bermunculan dari penjuru dunia

yang semuanya berisi kritikan-kritikan terhadap suasana yang berlaku di Indonesia. Terasa mulai ada guncangan ditengah keperkasaan cultuurstelsel, tetapi bukan semata disebabkan perubahan pandangan sebagian tokoh-tokoh bangsa Belanda terhadap rata-rata tanah jajahan, melainkan terutama akibat suasana pasar Eropa yang mengalami kelesuan. Hasil-hasil yang di bawa dari Indonesia tidak laku lagi. Satu demi satu komoditi mulai lenyap dari pasaran tahun 1856, indigo dihapuskan, menyusul kulit manis dan pala, sedangkan lada dan tembakau juga di hapuskan pada Tahun 1862. Delapan tahun kemudian disusul dengan pembekuan pengiriman tebu dan yang masih berlaku hanyalah kopi. Akhirnya pada Tahun 1870, secara resmi pemerintah Belanda menghapuskan sistem tanam paksa yang sangat sempat mengalami masa gemilang selama empat puluh Tahun.

Akibat suasana pasar Eropa yang mengalami kelesuan, hasil bumi Indonesia yang dibawa oleh Belanda tidak laku lagi, dengan hilangnya beberapa sumber pemasukan pemerintah kolonial, pada tahun 1888 ahli ekonomi belanda mengambil tiga kerangka penanggulangannya, yaitu :

1. Menaikan harga kopi di pasaran;
2. Memperluas lahan tanaman kopi;
3. Menghapus budi daya paksa dan menggantinya dengan pungutan pajak langsung.

Sewaktu rencana ini didisampaikan kepada para pejabat Hindia Belanda untuk diminta pendapatnya, tidak ada satupun diantara alternatif ini yang mungkin dilaksanakan di Sumatera Barat. Akhirnya pemerintah belanda menugaskan Residen Sumatera Barat Michelsen beserta aparatnya untuk mengadakan riset langsung kepada rakyat. Hasilnya menurut dalam bentuk alasan-alasan yang mendetil, sangat obyektif dan jelas tergambar bahwa praktis seluruh wakil rakyat menolak, lebih-lebih untuk membayar pajak langsung berupa uang dengan alasan situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Betapapun Michelsen berusaha memberikan pengertian tentang manfaat dan keringanan yang diberikan namun tidak bisa mempengaruhi

pendirian rakyat banyak. Akhirnya Michelsen sampai pada kesimpulan supaya pungutan pajak langsung segera dilaksanakan. Dia yakin segala sesuatu bisa diatasi asal dibarengi dengan tindakan militer yang tidak setengah-setengah. Kesimpulan Michelsen ini ditolak oleh pemerintah tertinggi Belanda dengan alasan perang Aceh masih berkobar.

Setelah melalui proses yang begitu lama dan dengan segala pertimbangan, maka dikeluarkanlah peraturan pajak itu tertanggal 9 Februari 1908 namun sampai di Padang pada tanggal 21 Februari 1908. Gubernur Belanda di Batavia secara resmi mengumumkan bahwa peraturan Pajak (*Incomstan Belastting*) harus berlaku tanggal 1 Maret 1908 untuk seluruh wilayah Indonesia dan segera dilaksanakan.

Peraturan ini telah merubah suasana kehidupan masyarakat di Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya. Peraturan ini disebarluaskan ketengah masyarakat melalui sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu yaitu melalui Kepala Laras. Peraturan ini dengan tegas ditolak oleh seluruh rakyat Minangkabau.

Pemerintah Kolonial Belanda gagal merebut pengaruh Lareh untuk pelaksanaan pungutan Belasting sehingga pada tanggal 16 Maret 1908, Tuan Luhak Agam J.WESTENNENK mengumpulkan semua Lareh yang ada di Agam Tuo di kantornya di Bukittinggi (sekarang SMAN 2 Bukittinggi). Adapun laras yang hadir adalah: Lareh Salo-Magek Agus Warido, Lareh Kamang Garang Dt. Palindih, Lareh Tilatang Jaar Dt. Batuah, Lareh IV Angkek Samat St. Sati, Lareh Kapau Dt. Rajo Labiah, Lareh Baso Adam Dt. Kayo, Lareh Candung Sahat Rajo Malenggang. Sementara dipihak Pemerintah disamping J.Westennenk juga dihadiri segenap stafnya. Dalam pertemuan tersebut J.WESTENNENK menekan para Laras tentang ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan segera sesuai bunyi perintah untuk wilayah kelarasan masing-masing. Pada dasarnya dalam teori memang penuh dengan prosedur-prosedur yang menarik dan merayu. Tetapi pada prakteknya jelas merupakan yang mendatangkan kesulitan, seperti salah sedikit saja atau terlambat selangkah saja bisa-bisa terjerumus kedalam penjara Belanda. Inilah yang penyebab

Perang Kamang, disamping dendam tak mau dijajah. Dari sekian banyak Laras yang hadir hanya Laras Kamang *Garang Dt.Palindih* yang menyanggah dengan tegas dan gigih semua rencana yang diajukan oleh J.Westennenk dan Scheltema de Here. Bawa Belastting tidak bisa dilaksanakan karena membebani rakyat yang selama ini selalu dalam kesulitan. Rapat menjadi kacau, tidak ada keputusan pelaksanaan Belastting. Para Laras berjanji akan membicarakannya dengan Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai terlebih dahulu. Berawal dari sanggahan Laras Kamang Garang Dt.Palindih dalam pertemuan dengan Kontleur Out Agam Westennenk; para pemimpin Adat, Agama dan cerdik pandai di Nagari Kamang bersatu menentang aturan pungutan pungutan belasting, yang akhirnya melawan penjajah belanda.

2. TANGGAPAN MASYARAKAT KAMANG TERHADAP BELASTING

Pandangan rakyat Kamang tidak berbeda dengan pandangan rakyat Minangkabau pada umumnya, Pemerintah Belanda menerapkan pepatah minang “*lalu jarum lalu kulindan*”. Setelah dilucutinya segenap kekuasaan dan kedaulatan “kata mufakat” di Minangkabau dengan sebab kekalahan kaum paderi, sesudah dilakukannya monopoli-stelsel, penanaman kopi dengan paksa dan penjualan kepada Kompeni dengan paksa pula, sesudah diadakannya pangkat-pangkat Laras yang menjadi susunan feodal baru tidak pernah dikenal oleh orang Minangkabau selama ini, sesudah rakyat dikerahkan dengan paksa pula bekerja rodi, maka sekarang dimulainyalah menerapkan peraturan baru berupa pungutan pajak langsung yang lebih dikenal dengan *belasting*. Belasting sangatlah menusuk perasaan ninik mamak dan seluruh kaum adat. Mereka mulai mengerti/menyadari bahwa kaum adat dan kaum agama tidak dapat dipisahkan. Dibeberapa negeri, yang tidak mempunyai orang yang mampu untuk mengerahkan rakyat, karena kekesalan hati, maka banyak mereka yang pindah. Adapun di nagari yang kokoh persatuan diantara ulama dengan ninik mamak, tidaklah mereka pindah secara besar-besaran, tetapi mereka bermufakat mengatur perlawanan, namun perlawanan tidak terkoordinasi serta belum adanya persatuan yang kuat antar nagari, sehingga satu persatu dapat dikalahkan. Beberapa nagari mengadakan pemberontakan, diantaranya yang

paling terkenal ialah di *Kamang*.

Walaupun Kamang sudah ditaklukan Belanda dalam Perang Paderi pada Juli 1833 namun semangat anti penjajahan rupanya tidak hilang begitu saja. Selama berselang waktu tiga perempat abad kemudian dikeluarkannya peraturan pungutan Blasting oleh Belanda, rakyat Kamang mulai menyusun kembali barisan untuk menentang penjajah Belanda dengan dikomandoi oleh pimpinan Adat, Agama dan Cerdik Pandai serta Kaum Ibu.

Sekembalinya Garang Dt. Palindih dari Kantor Tuan Luak Agam, beliau singgah kerumah saudara perempuannya di Pintu Koto yang bernama Gadua (sebagai Bundo Kanduang Nagari Kamang). Laras menyampaikan isi hatinya mengenai rapat dengan Westennenk. Garang Dt. Palindih menitik beratkan segala masalah yang akan diterima setelah terang-terangan menentang pelaksanaan pungutan Pajak. Pada waktu itu hadir pula seorang pemuda kemenakan Laras sendiri yang bernama A. Wahid Kari Mudo. Dia termasuk orang yang disegani dikalangan cerdik pandai Nagari Kamang. Ketika diminta pendapatnya tentang pungutan pajak tersebut, langsung dijawab oleh Kari Mudo dengan terus terang bahwa dia tidak setuju. Mereka berjanji akan menyerahkan persoalan ini kepada rakyat banyak. Setelah beberapa lama melihat situasi yang berkembang ditengah masyarakat banyak, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masyarakat Kamang dapat dikatakan 100% menolak pungutan pajak ini. Menentang Pajak berarti menentang pemerintah kompeni belanda, dengan tegas anti penjajah. Akhirnya Laras dan *Abdul Wahid Kari Mudo* membawa masalah ini kepada Basa nan Barampek seterusnya dibawa dalam sidang lengkap Ninik Mamak ***Kanagarian Kamang*** (sekarang *Kamang Hilir*). Atas dasar *cupak nan salingka suku, adat nan salingka nagari*, dimana Kamang sebagai penerus adat Koto Piliang, hirarkhinya adalah Basa nan Barampek, Pucuak nan Duo Puluah duo, Bungka nan Tangah Lapan Puluah merupakan pimpinan tertinggi tradisional ditengah-tengah masyarakat, dan sesuai dengan suasana yang berkembang dalam rapat dan melihat fakta yang ada di lapangan maka diangkatlah *M.Saleh Dt.Radjo Pangulu* sebagai pimpinan perlawanan menghadapi belanda.

Untuk mensosialisasikan Blasting kepada masyarakat, Westennennk sudah berulangkali mengunjungi Tuangku Lareh Kamang. Rapat diadakan di rumah Angku Lareh di Joho. Angku Lareh yang bijaksana selalu menghadapi Westennenk bersama pemimpin rakyat, baik dari golongan adat, agama dan cerdik pandai. Dalam suatu pertemuan dengan Westennenk pada tanggal 20 April 1908 yang dihadiri oleh para pemimpin dan rakyat. Kari Mudo menyampaikan pidato bahwa siapa yang membayar pajak adalah kafir. Ikut juga manyambah kato Dt.Adua, Dt Rajo Alam dari Pauh dan Dt.Makhudun dari Ilalang. Dalam pertemuan Westennenk yang paling keras memberikan kecaman adalah Dt.Rajo Pangulu. *Atas nama rakyat Kamang dia menyampaikan protes keras, bahwa blasting sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan yang miskin dan melarat akibat tanaman kopi dan kerja rodi yang berketerusan. Dia meminta supaya keputusan itu dirobah kembali. Setelah melalui perdebatan yang alot, Dt.Rajo pangulu sampai pada suatu kesimpulan yang berupa tantangan kepada pemerintah Kolonial. Rakyat tidak akan membayar pajak. Sekarang mau apa? Esa hilang dua terbilang, musuh tidak dicari bertemu pantang dielakan.*

Sementara itu Dt.Rajo Penghulu sendiri yang sudah sejak lama memahami semangat dan aspirasi rakyat Kamang juga bertekad tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya itu. Bukti ini semakin terlihat ketika suasana Kamang sudah dipenghujung saat meletusnya Perang Kamang yang termasyhur itu.

Dt. Radjo Penghulu, Kari Mudo dan H. Abdul Manan, bersama-sama dengan pemimpin Kamang lainnya antara lain, Dt. Siri Marajo, H.M.Amin, Dt. Mangkudun dan Siti Asiah dari kaum ibu, berhasil menggelorakan semangat rakyat, berikrar memusatkan perlawanan dan memekikan anti penjajahan, dengan semboyan *“perang adalah jalan yang terbaik dan bukan sia-sia sekalipun kalah”*, sehingga pasukan rakyat seolah-olah mempunyai kekuatan gaib menghadapi perang menempuh maut tanpa ragu.

Sementara itu Wahid Kari Mudo bersama Haji Jamik pada pertengahan Mei 1908 berusaha menemui Dt. Mudo di

Payakumbuh, Syekh Koto Baru dan Pado Kayo di Suayan untuk meminta petuah dan sekaligus penangkal untuk persiapan serta mencari dukungan (personil) menghadapi peperangan yang tidak lama lagi.

Sebagai persiapan lebih lanjut diadakan rapat di Surau Tuangku Pincuran yang dihadiri oleh Dt. Makhudun, Kari Mudo, Dt.Rajo Pangulu, Tuangku Sutan dan Dt.Tan Basa (Penghulu Suku dari Babukik), dengan kesesuaian paham lagi untuk tidak membayar Pajak.

Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 1908 di Mesjid Taluak (Kamang) diadakan rapat yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Agam Tuo, Lubuk Basung, Manggopoh, Padang Panjang, Batu Sangkar dan lain-lain. Rapat langsung dipimpin oleh M. Saleh Dt.Rajo Pangulu dengan keputusan rapat *Kebulatan Tekad Melancarkan Aksi Untuk Menentang Belanda*.

Dt. Rajo Pangulu bersama-sama dengan tokoh Kamang lainnya menggerakan dan menghidupkan semangat patriotisme di Kamang serta memesan senjata ke Salo. H. Abdul Manan membawa kata sepakat dan menyusun perlawanan di Bukik (Bansa-Pauh = Kamang Mudiak sekarang), Wahid Kari Mudo memberikan ransangan kepada kaum muda disamping sebagai intelijen.

Pada tanggal 11 Juni 1908 diadakan pertemuan di surau H.Abdul Manan, yang dihadiri antara lain Haji Amat (putra H.Abdul Manan), Maruhun Putiah, Dt. Rajo Pangulu, si Hitam, Dt. Marajo, Siti Asiah dan murid/pengikut H. Abdul Manan. Beliau meminta semua jangan ragu mati syahid dan kalau dia sendiri tewas agar perjuangan diteruskan. Beliau yakin dapat menghadapi Belanda dengan segala akibatnya walaupun pada saat-saat terakhir banyak pengikutnya yang menarik diri.

Apa yang telah disampaikan diatas adalah merupakan tahapan atau rangkaian persiapan menghadapi perang dengan belanda yang meletus tanggal 15 Juni 1908 yang lebih di kenal dengan Perang Kamang.

3. PUNCAK PERANG KAMANG

Perang Kamang 1908 adalah perang terbuka yang meledak 15 juni 1908 dan merupakan salah satu puncak dari kemelut susana anti penjajahan rakyat Sumatera Barat menentang penjajahan Belanda.

Namun sebelum masuk pada uraian detik-detik jalannya Perang Kamang 15 Juni 1908 dalam bentuk penyerbuan besar-besaran pasukan rakyat terhadap Belanda, terlebih dahulu ada hal yang sangat penting di garis bawahi :

1. Bahwa apa yang di kemukakan disini adalah semata-mata berdasarkan fakta yang terkumpul, KHUSUS YANG BERKAITAN DENGAN PERLAWANAN RAKYAT KAMANG.
2. Bahwa dengan tujuan sengaja tidak ingin keluar dari pokok tulisan semula yaitu memproyeksikan setiap rangkaian peristiwa pada **Kamang Sebagai Subjek sejarah**, maka sasaran intinya lebih ditiak beratkan ke arah bentuk eksistensi seluruh Masyarakat Kamang dan Pimpinannya.

Masalah ini perlu di tekankan, mengingat Kelarasan Kamang mempunyai kawasan meliputi Kanagarian Kamang (sekarang Kamang Hilir) Kenagarian Surau Koto Samiak (sekarang Kamang Mudiak), Suayan dan Sungai Balantiak, dengan pusat pemerintahan kelarasan dimana seluruh aktifitas kepemimpinan Lembaga Adat, keagamaan dan lain-lain di atur, terletak di Kenagarian Kamang Hilia.

J.Westennenk secara berturut-turut masih berusaha mendatangi rakyat Kamang mengenai perdebatan mengenai persoalan itu ke itu juga, malah lebih menambah kebencian dan memperkuat semangat aksi rakyat terhadap belanda, yang sebenarnya pada masa itu sedang mengalami guncangan politik yang rata-rata melanda Negara Eropa Barat.

Pada hari Senin tanggal 15 Juni 1908 seorang warga Magek datang ke Kantor Laras untuk membayar Belasting. Ia langsung dihadang oleh sekelompok warga setempat, diancam akan dibunuh jika ia tetap membayar belasting, karena ia melanggar tekad bersama untuk menentang Belanda. Laras Magek (yang bernama Warido) marah dan segera menyampaikan hal ini

kepada J. Westennenk dan meminta supaya pembangkang ditangkap. Westennenk menghubungi Gubernur Hecler untuk meminta petunjuk, hanya sepathah kata yang diucap Hecler sesuai perintah Gubernur General Van Heutez, yaitu “serbu”.

Apa yang terjadi pada tengah malam sampai dini hari tanggal 15 dan 16 Juni 1908 dapat dibaca dalam laporan Gubernur Sumatera Barat Hecler kepada Gubernur General Van Heutez:

*“Kemarin patroli di Bukittinggi dibawah Westenenk untuk menangkap para pemimpin di berbagai kampung. Baru saja datang kawat dari pejabat residen Bovenlanden, minta bantuan tentara karena tadi malam terjadi perkelahian hebat di Kamang. Sepuluh kali rakyat menyerang dengan senjata tajam. Pihak kita mati 9, 13 luka-luka. Dari pihak rakyat 90 mati. Tentara sangat letih karena aksi selama 12 jam, 4 brigade marsose dikirim dari Padang Panjang ke Bukittinggi. Patroli Westennenk sewaktu menggeledah rumah-rumah diserang oleh 25 orang berpakaian putih yang mulamula sembunyi dibelakang rumah : 5 serdadu dan 2 pribumi mati Kemudian dijalan, tentara diserang 50 orang dengan kelewang, mereka semua mati, Antara yang meninggal adalah **Datuk Rajo Pangulu** dan lain-lain pemimpin termasuk 2 wanita. Kemudian Penghulu Kepala Ilalang yang sudah pensiun dibunuh beserta 5 kuda dan rumahnya dibakar. Datuk Parpatih ditangkap di Magek. Dia sempat membunuh Warido dan Pengulu Kepala Tigo Lurah, melukai 2 serdadu”. (Pemberontakan Pajak 1908, Rusli Amran, hl 142-143).*

Untuk lebih detilnya apa yang terjadi di Kamang pada tanggal 15 Juni 1908 tersebut, dapat diketahui dari laporan Kontrolir Westennenk pada Gubernur Heckler. Westennenk melaporkan bahwa keadaan di Kamang dan di Magek sangat serius, tidak menguntungkan dan diharap tindakan segera diambil dengan menangkap para pengacau yang akan dilakukan melalui 3 patroli tentara. Kemudian setelah diadakan penangkapan-penangkapan di Tangah, kita tunggu apa yang akan dikerjakan penduduk. Sebelum berangkat untuk patroli, Kepala Laras Tilatang melaporkan kepada Westennenk bahwa H. Abdul Manan mempunyai 30 sampai 50 murid yang telah diberi jimat dan sedia

mati. Para Pandai Besi di Koto Baru mendapat begitu banyak pesanan senjata tajam, sehingga tidak dapat terpenuhi semuanya. Kepala Laras Kamang mengingatkan kepada rakyatnya bahwa kompeni akan datang pada hari senin. Rakyat yang mendapat khabar demikian segera mempersiapkan diri menanti kedatangan pasukan belanda. Kain kafan dibagikan. Pada sore harinya orang-orang di Kamang (terutama di Tangah) memakai pakaian bagus karena mereka tidak membutuhkan pakaian lagi.

Westennenk mengerahkan 160 pasukan, 30 orang masuk dari Gadut yang dipimpin oleh Letnan Heyne dan Cheriek; 80 orang masuk dari Tanjung Alam dipimpin oleh J.Westennenk; 50 orang masuk lewat Biaro dipimpin oleh Letnan Boldingh dan Letnan Schaap. Di sepanjang perjalanan terjadi perlawanan rakyat, diantaranya yang cukup hebat adalah di Magek yang dipimpin oleh Dt.Perpatiah. Menyenggung sedikit tentang perlawanan di Magek dibawah pimpinan Dt.Perpatiah; Laras Magek setelah melapor kepada J.Westennenk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Boldingh dan Letnan Schaap yang masuk lewat Biaro. Sesampai di Kubualah pasukan ini membelok ke Magek. Pasukan inilah yang terlibat pertempuran dengan pasukan rakyat Magek dibawah pimpinan Dt.Perpatiah. Dalam pertempuran tersebut Dt.Perpatiah berhasil membunuh Laras Warido sebelum ia tewas ditembus peluru Pasukan Belanda. Dt.Parpatiah dan beberapa pengikutnya gugur sebagai Pahlawan Bangsa.

Pada senja hari, Belanda mulai bergerak mengepung rumah H. Abdul Manan untuk menangkapnya, karena pada masa itu Belanda juga beranggapan yang menjadi dalang pergolakan adalah kaum agama, tetapi beliau berhasil meloloskan diri ke Kamang. Sesampai di Kamang H. Abdul Manan segera menemui Dt. Rajo Penghulu untuk berkonsultasi. Dt.Rajo Pangulu mengadakan rapat kilat yang dihadiri oleh Kari Mudo, H. Abdul Manan dan beberapa tokoh pejuang Kamang lainnya membahas perkembangan yang kritis dan menyusun kesiagaan seluruh rakyat guna mengobarkan perang sabil. Menjelang pukul 00.00 diterima informasi bahwa pasukan Belanda berkumpul di Kampung Tangah (perbatasan Kamang dengan Bukik). Dari segi

militer daerah ini memang strategis. Selain dikelilingi oleh persawahan yang membuat pemandangan ke jalan raya satu-satunya, dan juga penduduknya tidak seberapa. Ini disadari benar oleh Dt. Rajo Penghulu. Dia mulai menyiapkan pasukan tempur; beduk, tong-tong dan bunyian lainnya dibunyikan di setiap kampung, pertanda perang akan dimulai.

Pasukan rakyat dari seluruh kampung yang ada di Nagari Kamang dengan jumlah ratusan orang dipimpin langsung oleh M.Saleh Dt.Rajo Penghulu, terlebih dahulu berkumpul di Mesjid Taluak untuk menerima penjelasan/instruksi penting sebelum dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang terbesar adalah yang dipimpin oleh Kadi Abdul Gani. Setelah selesai Shalat berjemaah lalu ditutup dengan pekik *Allahu Akbar, Laailahaillallah*, mereka menuju Kampung Tangah menyerang pasukan Belanda. Untuk menuju Kampung Tangah mereka lewat bukan melalui jalan raya, melainkan memilih jalan pintas yaitu dari Taluak melalui Bungo Tanjuang, melalui areal persawahan, Dalam Koto, Rawang dan Koto Panjang. Dalam rombongan tersebut ikut 2 (dua) orang wanita yaitu Siti Asiah istri Dt.Rajo Penghulu dan Siti Anisah istri Nan Basikek.

Kelompok yang pertama kali melakukan penyerangan tehadap seseradu adalah kelompok yang dipimpin oleh Malin Manangah. Serangan tertuju pada seksi yang dipimpin oleh Sersan Schreuder, yang menewaskan 4 serdadu jawa dan 2 serdadu melayu. Diantara keremangan malam, J.Westennenk dari tempatnya berada bersama pasukannya melihat semua pasukan rakyat ini, bahkan juga sudah mengenal bayangan Dt.Rajo Pangulu bersama dengan pemimpin lainnya. Dia masih belum, mau bertindak karena dia masih punya harapan untuk membujuk kemarahan rakyat. Lantas dia berteriak menyuruh pasukan rakyat pulang kembali mengingat kekuatan kompeni cukup banyak dengan personoil dan senjatanya. Dia juga mengingatkan segala kemungkinan bisa terjadi sekiranya pasukan rakyat masih bermaksud maju terus. Namun seruan itu segera pula dijawab dengan tegas oleh Dt.Rajo Pangulu bahwa pasukan rakyat tidak akan mundur setapakpun dan bersedia mati syahid. Pasukan

rakyat masih terus berangsur maju mendekati tentera belanda. Setelah jarak musuh lebih kurang 50 meter, Westennenk memerintahkan pasukannya untuk menembak, bersamaan dengan itu pasukan rakyat dengan senjata rudus ditangan menyerang dengan cepatnya. Sebagian mereka tewas kena peluru tentara Belanda. Sebagian lagi mereka berhasil memasuki kelompok tentara belanda dan menyerangnya habis-habisan, membuat tentara belanda kucar-kacir. Pasukan Westennenk tidak menyangka ini bisa terjadi, mulai mundur. Perwira kesehatan Dr.Justesen dan Sersan Boorsma berusaha keras mencegah tentara mundur, ketika menyaksikan seorang penyerang membelah kepala seorang sersan. Kemudian dari arah lain beberapa orang penyerbu juga berhasil memasuki kelompok tentara. Terdengar beberapa kali tembakan disusul jatuh empat orang diantara mereka. Tetapi belasan yang luput langsung menghabisi para serdadu tanpa ampun. Begitulah pasukan rakyat menyerang tentara belanda sampai sepuluh kali serangan. dengan berkelompok yang terdiri dari 20 sampai 30 orang. Serangan yang sangat serius adalah serangan gelombang ke 8 karena dilakukan dalam jumlah yang besar.

Dalam kesimpulan laporan resmi J.Westennenk kepada Gubernur General Van Heutsz di Batavia melalui surat kawat tanggal 17 juni 1908, disusul laporan Gubernur Sumatera Barat Heckler nomor 1012 tanggal 25 Juni 1908, dia melukiskan malam itu seumpama satu malam dimana jurang antara ras manusia dengan segala kekuasaannya tidak ada lagi. Yang ada Cuma kelompok kemarahan yang saling bertentangan dengan buas dan siap untuk saling membunuh.

Bertepatan fajar menyingsing pasukan belanda mendapat bala bantuan tentara dari Bukittinggi, mereka datang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga babak kedua perang basosoh segera meledak kembali. Akan tetapi lantaran pasukan itu terlalu banyak dan segar-segar, dilengkapi pula dengan senjata modern, akhirnya pasukan rakyat terpaksa mengundurkan diri. Maka tercatatlah pagi itu sebagai sejarah berkabut di hati setiap bangsa Indonesia di dalam menentang kolonial Belanda. M.Saleh Dt.Rajo Pangulu

bersama 69 orang anggota pasukan rakyat syahid sebagai pahlawan bangsa, diantaranya terdapat dua orang srikandi yaitu siti Asiah istri Dt.Rajo Pangulu dan Siti Anisah. Selain itu mengalami cacat tercatat 20 orang.

Dibawah komando Tuangku Lareh, semua pejuang dari Kamang yang gugur dibawa kembali ke Kamang dan dimakamkan dekat mesjid Taluak. Waktu pemakaman dilaksanakan, khusus untuk makam Panglima Perang (M.Saleh Dt. Rajo Pangulu) dan Siti Asiyah (istri M.Saleh Dt.Rajo Pangulu) sebagai Srikandi Perang Kamang dibuat berdekatan. Makam tersebut telah resmi menjadi *Makam Pahlawan*. Diresmikan oleh Wampa Bidang Pertahanan dan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) Bapak Jendral A H Nasution pada tanggal 15 Juni 1963, dengan nama *MAKAM PAHLAWAN PERANG KAMANG 15 JUNI 1098*.

Setelah berlangsung penyerangan gelombang kedua oleh Pasukan Rakyat Kamang terhadap tentara Belanda di Kampung Tangah. Pasukan rakyat Nagari Bukik (Bansa-Pauh) yang digerakan oleh H.Abdul Manan dan kawan-kawan yang datang dari arah Bansa, terlebih dahulu membakar rumah Penghulu Kepala Hilalang dan membunuh ayahnya (Jamil Dt.Tumanggung, bekas penghulu Kepala Hilalang), membunuh 5 ekor kudanya. Setelah itu baru mereka menyerang Tentara Belanda berbarengan dengan pasukan rakyat kamang. Akan halnya H.Abdul Manan bersama para pengikutnya langsung ditembak mati keesokan harinya dikampung kelahiran beliau di Bansa. Pasukan rakyat dari nagari ini yang tewas dan luka adalah sebanyak (menurut catatan Westennenk tewas sebanyak 13 orang dan luka 3 orang, daftar terlampir). Semua Pahlawan yang tewas dari nagari ini, semuanya dimakamkan di Kampung Budi. Sekarang makam tersebut telah masuk *Situs Sejarah* dengan nama *MAKAM ABDUL MANAN*. Beberapa pemimpin rakyat lainnya dari nagari ini ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda, diantaranya H. Ahmad Marzuki.

2.1.4 Kamang Awal Abad Ke 20

Serikat dagang Islam yang kini telah menjelma jadi serikat Islam, tampaknya motor terdepan yang melejit jauh di arenapergerakan

Bangsa Indonesia di organisasi kuat dan teratur rapi. Bertitik tolak dari upaya konsistensi irama perjuangan secara Nasional dengan program pokok memperbaiki kehidupan sosial antara sesama masyarakat Kamang, maka pada tahun 1916 sebagai langkah pertama di bentuk organisasi yang di beri nama SERIKAT MATI. Tujuan organisasi ini adalah mengurus masyarakat setiap warga yang meninggal dunia, sejak mulai mengapani sampain dengan tertanam dan selanjutnya mengatur sistem pengajian di rumah siwaris, berikut semua biaya-biaya, sehingga telah menarik hampir semuaorang untuk ikut anggota.

Walaupun mendapat rintangan dari Pemerintahan Belanda, namun mereka terus menyempurnakan program organisasi, termasuk program jangka panjang. Di bidang pendidikan misalnya, kalau selama ini masyarakat Kamang melaksanakan pendidikan Agama di surau-surau, maka menjelang tahun 20-an telah berhasil membentuk sebuah sekolah agama yang sementara bertempat di Balai nagari. Kalau selama ini mereka sebagaim orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk melawan kaum penjajahBelanda, tetapi kini berbalik mereka arahkan kepada masyarakat banyak.

Di saat maha genting itulah, seorang Ulama besar dari Bukittinggi bernama Syekh Muhammad Jambek tergugah hatinya untuk memperbaiki suasa gelap masyarakat Kamang. Dengan susah payah beliau meluangkan waktu untuk datang ke Kamang dalam upaya menuntun masyarakat kembali merenungkan kenyataan yang di hadapi akibat perbuatan dilarang agama selama ini. Hasilnya di luar dugaan Dakwah yang di adakan setiap Petang Sabtu bertempat di gudang Tuangku Laras Dusun Joho berhasil menormalisasi keadaan dan sebegitu jauh makin banyak di kunjungi anggota masyarakat di sekita Kamang.Ini terjadi pada tahun 1911.

Namun dalam perkembangannya nanti, pada tahun 1915 tempat pengajian ini di bakar oleh orang-orang yang belum mau tobat, dan pada Tahun itu juga berhasil di bangun suaru yang cukup bersar sebagai penggantinya, yang terkenal dengan surau Inyiak Jambek. Berjalan di atas kesengsaraan dan kegelapan dalam

mencari titik terang, riwayat pendidikan Islam terus melangkah perlahan-lahan tapi pasti. Pada tahun 1921 M.Isa labai Ismail yang kembali ke kampung halaman telah selesai menuntut pelajaran Agama di parabek, bersama sama Thalut St. Perpatih berusaha memperjuangkan sistem pendidikan tersebut menjadi sistem madrasah dengan di dukung oleh Qasasi Labai Mudo dan Haji jamiak, yang baru saja kembali dari pengembalaan dari Jawa dan Makasar, mulailah mereka bekerja keras mewujudkan cita cita mereka tersebut. Akhirnya gagasan mereka mendapat sambutan baik dari Kepala Nagari yang waktu itu di jabar oleh Dt. Marajo dan mengizinkan tingkat atas Balai nagari untuk tempat belajar sementara.

Tahun 1913-1919 adalah merupakan bangkitnya atau masa mulai hangat-hangatnya semangat pergerakan terutama meningkatnya Pamor SDI, pengaruh inipun menerobos ke Nagari Kamang sebagai inspiratornya adalah seorang pemuda yang bernama Ramaya. Dan dalam waktu yang singkat ramaya berhasil menyesuaikan paham dan menanamkan keyakinan di dalam hati masyarakat banyak, terutama hakikat perjuangan di pandang dari segi politik. Dia menkankan prinsip-prinsip tentang perpecahan antara awak sama awak yang berhubungan dengan politik “Pecah dan Adu” Kolonialis belanda.

Penerimaan baik dari semua kalangan, terutama golongan alim ulama yang begitu rupa, benar-benar telah menyelamatkan masyarakat Kamang dari segala bentuk perbedaan pendapat, keyakinan atas sakitnya penjajahan, serta pengertian usaha yang perlu di lakukan sebagai masyarakat tertindas, telah membuat Kamang tidak dapat lagi di pengaruhi anasir-anasir jahat. Dan dasar inilah menjadi modal utama untuk memetik berbagai hasil didalam beberapa aksi. Tidaklah satu kebetulan saja, apabila Tahun 1926 yang hebat itu mendapat sokongan dari sejumlah lapisan Masyarakat sebagaimana kelak terkenal dalam sejarah dengan PEMBERONTAKAN KAMANG 1926.

2.1.5 PEMBERONTAKAN KAMANG 1926

Istilah pemberontakan Kamang pada tahun 1926 adalah salah

satu predikat yang di sesuaikan dengan identitas sejarah Kamang yang diwariskan sejak dahulu dan tidak dapat di pisahkan dari rumusan perlawanan tersebut secara keseluruhan.

Di sebabkan larangan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas, di tambah ketetnya pengawasan resersir-resersir pribumi terhadap para pemimpin para pergerakan agar tidak meniru niru suasana di kota – kota besar, maka usaha kaum pergerakan di Kamang terpaksa di bina secara sembunyi- sembunyi. Tetapi lantaran sudah terlalu banyak kehilangan pimpinan yang pandai semasa Perang Kamang 1908, memaksa tokoh-tokoh dekade 20 an, harus bekerja keras lahir maupun pikiran dalam mengatasi rintangan di tengah keadaan yang serba sulit itu.

Dalam beberapa Tahun saja berada di kamang , Ramaya sudah bercampur baik dengan semua golongan masyarakat, tidak saja dengan pemimpin para ulama, tokoh-tokoh adat dan cerdik pandai (tali tiga sepilin) tapi juga dengan pemuda pemudinya. Akhirnya secara bersama-sama dia tampil membentuk sebuah serikat yang waktu itu sangat di takuti yaitu Serikat Hitam. Organisasi ilegal ini pada dasarnya menganutaliran keras, mempunyai prinsip radikal dan fanatis, sasaran pertamanya adalah melenyepkan penjajahan serta semua penjilat-penjilat dan pengkhianat-pengkhianat bangsa dari bumi dan tanah air.

Dari semua data yang berhasil di kumpulkan dapat di ambil semacam ukuran, bahwa pemberontakan Kamang 1926 termasuk akar perjuangan bangsa dalam menopang cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti telah di uraikan sebelumnya, bahwa sejak Tahun 1916 sistem kelarasan di hapuskan di seluruh Minangkabau. Dan untuk wilayah yang biasanya diperintah laras, kini dijabat oleh seorang Angku Palo, tahun 1926 di Kamang, jabatan ini di pangku oleh Dt. Nan Laweh. Keberadaannya ditengah kehidupan sosial masyarakat kamang, belum dapat dikatakan membawa angin segar, karena seluruh suasana masih tergenggam di tangan pemerintahan Belanda.

Setelah mempelajari suasana yang sedang berkembang dan suhu politik nasional yang menuntut tindak lanjut perjuangan,

akhirnya tinggalah sebeban tanggung jawab yang menunggu pelaksanaan kerja, satu beban yang di telorkan dengan suara bulat oleh pemuka – pemuka Kamang.

Dalam pertemuan terakhir yang di hadiri oleh sebagian besar tokoh serikat hitam seperti Ramaya, Jamaluddin Malin Sutan, Dt. sipadoH. Malik, Dt. Maleko, Abu Dt. Rajo pangulu, Dt. Bajangguik, Dt Simajo Nan Hitam, Dt. Panduko Sianso, Dt. Kodoh, Dt. Muncak dan pemuka-pemuka adat lainnya, tibalah mereka pada kesimpulan pokok yaitu segera membersihkan Nagari Kamang dari antek-antek kolonial.

Pilihan pertama tertuju pada seorang hakim Lumbung Pitih Nagari yang bernama Dt. Tanang sati. Berdasarkan hasil pengamatan dan penyeledikan organisasi serikat hitam, terdapat indikasi kuat dan petunjuk bahwa orang ini mempunyai hubungan rahasia dengan Pemerintah belanda. Begitu mempeoleh informasi, maka pada suatu malam di Tahun 1926 itu, bergeraklah dari markasnya serombongan kaum pejuang yang di pimpin oleh Ramaya dengan tujuan tempat kediamannya Dt. Tanang sati di Ladang darek. Tepatnya di rumah Upik Karima, Ibu Tiri Dt. Tanang Sati sendiri, turut juga bersamanya tokoh-tokoh penting dan serombongan massa yang puluhan jumlahnya. Mereka insyaf bahwa sikap damai takkan pernah membawa kedamaian. Karena kolonial Belanda tetap menganggap sikap damai itu suatu kelemahan.

Menurut cerita yang di peroleh kemudian dari pada saksi mata yang hadir, Dt. Tanang sati mulai gelisah. Agaknya firasat buruk telah menyentuhnya. Ia berjalan hilir mudik di tengah ruangan seolah berfikir. Keadaan tetap di bungkus kesepian. Letusan tunggal yang di lepaskan oleh salah seorang anggota penyerbu yang bersembunyi di kegelapan, ternyata telah merubah jalan hidup Dt. Tanang Sati dan ternyata pula nanyinyaikut merubah sejarah Nagari Kamang di dalam arti keseluruhannya. Dcengan Luka ditubuh Dt. Tanang sati terhuyung-huyung masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tetapi apa hendak di kata, segala sesuatu tidak mungkin lagi di lakukannya, karena dari arah pintu masuk muncul beberapa laki-laki bertopeng. Dan suasana tegang itupun berubah jadi hiruk piruk, hampir semua

penyerbu bergerak mengurung Dt. Tanang Sati , Di atas lantai Dt. Tanang Sati dalam keadaan tidak bernyawa di tengah genangan darah sendiri.

Untuk beberapa hari, kehilangan Dt. Tanang sati ini belum menimbulkan reaksi menyolok dari pihak Pemerintah Belanda, karena seluruh masyarakat meberi alibi yang sudah di atur sebelumnya yaitu mengatakan orang itu pergi ke Kuok, tetapi sewaktu di Kuok pemerintah Belanda Memperoleh Informasi bahwa Dt Tanang sati tidak pernah datang ke sana, barulah tanda-tanda Panas menguasai seluruh Nagari kamang. Akhirnya Belanda mengerahkan beratus Tentara unutk menangkap semua Penduduk Kamang. Mereka di rantai satu sama lain dan di kumpul di Pekan magek di jemur dan di siksa. Peristiwa ini merupakan binitk hitam dari sekian banyak rentetan kesengsaraan yang menimpa perjuangan rakyat Kamang untuk menentang Belanda, karena sampai saat itu mereka telah banyak kehilangan tenaga pimpinan yang potensial dan militan yang sangat di butuhkan oleh masa depan dan perjuangan itu sendiri. Sejarah pemberontakan kamang 1926 telah menemui kegagalan pada langkah awal disebabkan hukum kekurangan seperti diuraikan pada bagian terdahulu.

Prosedur peradilan terhadap tokoh-tokoh pejuang 1926, boleh dikatakan tidak memakan waktu lama, karena sesuai aturan mainnya tidak ada lagi yang sesuai dengan ketentuan yang diakui oleh dunia demokrasi. Pemerintah Hindia Belanda bertindak lebih banyak berdasarkan bukti yang dikumpulkan “resersir inlander”. Kepastian detail tidak perlu dicari, hanya tinggal menjalankan, salah atau benar harus dihukum. Sehingga demikian akan menghemat tenaga dan waktu tuan residen dalam menjatuhkan Administratif Mastregelen yaitu bentuk hukuman yang oleh negara beradap di anggap sebagai salah satu hukum yang tidak berperi kemanusiaan, dibuang kehutan rimba atau pulau terpencil yang jauh dari kehidupan.Selain itu yang membuat sidang tidak menyita waktu lama adalah kepercayaan kaum Nasionalis sendiri tentang nasib yang bakal diterima sesudah penangkapan. Tidak ada gunanya sama sekali mempertahankan

diri apalagi menuntut keadilan terhadap kekuasaan yang berdasarkan kekuatan Polisi, Tentara dan Hakim yang memiliki Undang-Undang di dalam kerongkongan dan sewaktu-waktu bisa meluncur dari bibirnya.

Kelak ini terbukti dalam sejarah pergolakan rakyat Kamang, dengan jatuhnya vonis buang seumur hidup terhadap : Dt Tuo, Dt Mareko, Dt Bajangguik yang kemudian juga di susul oleh Ramaya yang berhasil mereka tangkap, diantara mereka itu ada yang sampai menutup mata di sana. Jamaluddin Malin Sutan, Dt Sipado, H Malik di buang ke Digul. Sedangkan tokoh lainnya seperti Dt Rajo Pangulu, Dt Simanjo nan Hitam, Dt Panduko Sianso mendekam dalam penjara Sukamiskin dan penjara Madura selama berpuluhan Tahun.

Namun syukur masih ada beberapa pemuka yang berhasil menyelematkan diri secara sembunyi-sembunyi ke Malaya dan bergabung dengan Abdul manan Labai Sampono yang telah lebih dahulu berada disana. Merek itu adalah Amirudin Dt Muncak, Immamuddin, Dt. Kodoh, Kasasi Labai Mudo dan seorang pelarian dari Padang Sibusuk, yang kemudian dalam pergaulan masyarakat Sungai Jenderam lebih di kenal dengan panggilan “sipartai”.

Setelah lebih kurang 1 tahun berada di Malaya pada Tahun 1924 A. St Manan Labai Sampono kembali ke kampung halaman. Tetapi karena suasana yang terasa semakin memanas, menyebabkan Tahun 1925 beliau pergi lagi dengan salah seorang anak lelakinya yang bermam A. Dailman. Mereka mentap di seremban dan di angkat menjadi Guru oleh Syahbandar dan Kepala Khadi. Tetapi tidak lama kemudian Haji Jalaluddin yang berasal dari Payakumbuh datang menjemput beliau untuk di bawa ke Sungai Jenderam, guna mengantikannya sebagai guru pada Madrasah Ubudiyah di sana, berhubung keberangkatannya ke Mekkah.

2.1.6 ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

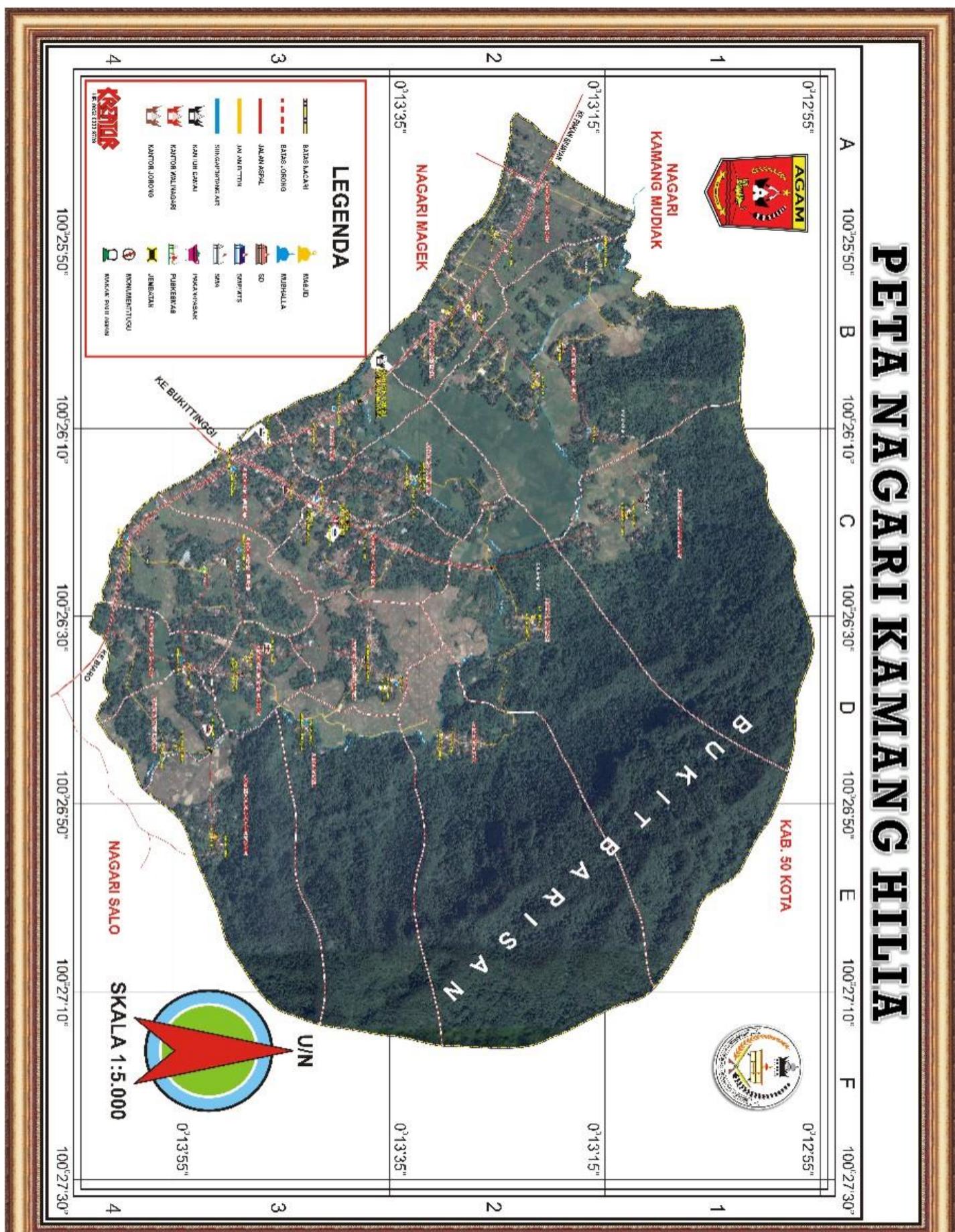
Selama pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945, sebenarnya tidak banyak kegiatan masyarakat Kamang yang patut di tonjolkan, lantaran sangat mendadaknya perubahan

situasi akibat penyerbuan Jepang. Buah yang dapat di petik selama tiga setengah tahun di bawah penjajahan si”pelindung, pemimpin dan cahaya Asia “Jepang, terbukti tidak banyak mengalami perbaikan malah lebih parah lagi. Dapat di katakan bahwa dirasakan sebagai pukulan yang mematikan, di tindas Jepang yang sangat kejam itutelah membawa pengaruh yang besar terhadap jiwa dan semangat, hingga seluruh bangsa Indonesia mengalami revolusi jiwa. Pelaksanaan rencana ekonomi dan sosial semakin morat marit akibat pelaksanaan rencana ekonomi perang dan kerja kerja paksa yang di pikulkan pada satu satunya daerah kependudukan. Tetapi inilah yang nantinya menjadi bumerang kejayan Jepang di Asia, dimana palu godam rakyat dan tekanan sekutu, membuat sejarah itu sebagai sejarah terpendek lantaran terpaksa mengaku kalah pada Tahun 1945.

Dan Kamang sebagai kawasan kecil, juga tidak terlepas dari gambaran di atas. Setelah Jepang meluaskan pengaruh dan kekuasaannya ke pelosok-pelosok terpencil, maka semboyan kerja sama ata dasar ”saudara tua” cukup mendapat tempat di hati rakyat banyak. M.Saufa dan Dt Rajo Marah segera mengambil inisiatif untuk membentuk persatuan pemuda bernama Bagodang yang mempunyai tujuan membantu usaha-usaha pemerintah menetralisir situasi dan perbaikan masyarakat, disamping tujuan utama sebagai wadah kegiatan masyarakat desa yang di pelopori oleh kaum muda. Selain itu nantinya dalam sejarah Kamang, tumbuh pula sebuah organisasi pemuda lain, yaitu Sinendang yang dapat di sebut sebagai mitra koalisi. Organisasi ini di dirikan oleh Saibi St Lembang Alam dan Ahmad Jalaluddin berazakan sosial di tambah didikan mental tetapi sedikit keras berbau ala Jepang. Juga di samping kedua organisasi di atas ternyata kaum wanita pun tidak ingin mau ketinggalan, dimana mereka membentuk pula sebuah organisasi Hahanokai dibawah pimpinan Nursana. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, tapi lebih mengutamakan keterampilan-keterampilan wanita.

2.2 Kondisi Nagari

2.2.1 Peta Nagari



batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. 50 Kota
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Magek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Salo, Kec. Baso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kamang Mudiak

Nagari Kamang Hilia terdiri dari 17 (tujuh belas) Jorong, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 1 Luas Jorong di Nagari Kamang Hilia

NO	JORONG	LUAS (M ²)
1	2	3
1.	Jorong Koto Panjang	53
2.	Jorong Dalam Koto	150
3.	Jorong Dangau Baru	87
4.	Jorong Batu Baraguang	75
5.	Jorong Solok	11
6.	Jorong Bancah	12
7.	Jorong IV Kampuang	25
8.	Jorong V Kampuang	23
9.	Jorong Koto Nan Gadang	57
10.	Jorong Binu	7
11.	Jorong Balai Panjang	12
12.	Jorong Guguak Rangpisang	15
13.	Jorong Koto Kaciak	12
14.	Jorong Nan VII	132
15.	Jorong Pintu Koto	126
16.	Jorong Ladang Darek	97
17.	Jorong Joho	9
JUMLAH		900

Nagari Kamang Hilia berada pada dataran tinggi ± 800 mdpl, dengan topografi dataran yang dibarengi dengan perbukitan yang merupakan bagian dari gugusan bukit barisan, perbandingan antara dataran dengan perbukitan adalah 40:60. Kemiringan tanah berkisar 5-20 %. Jenis tanah

di kenagarian Kamang Hilia (wilayah dataran) berupa tanah humus yang cocok untuk semua jenis tanaman, sedangkan wilayah perbukitan terdiri dari tanah dan batuan karst. Kamang Hilia juga dilewati oleh 2 aliran sungai yaitu Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Tangalau.

Suhu rata-rata di Nagari Kamang Hilia berkisar 19 – 27 C° dan kelembaban udara sekitar 75.5% - 85.5% Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun 2000-2500 mm/tahun tanpa bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (67 mm) dengan hari hujan sebanyak 5 hari Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Kamang Hilia akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Kamang Hilia di dominasi areal pertanian, perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

2.2.3 Kondisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi (tanah), air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia Potensi alam merupakan suatu potensi fisik dasar yang dimiliki suatu wilayah atau kawasan. Potensi-potensi alam yang dimiliki Nagari Kamang Hilia, antara lain:

a. Kondisi tanah/Lahan

Kondisi tanah di Nagari Kamang Hilia termasuk tanah yang subur sehingga baik digunakan untuk lahan pertanian. Sebagian besar tanah di Nagari Kamang Hilia digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian yang ada. Tanaman-tanaman pertanian seperti padi, Ubi Kayu, Jeruk, Kakao, serta tanaman lainnya dapat berkembang dengan baik sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat Nagari diperoleh dari sektor pertanian.

Tabel 2.

Daftar pemanfaatan lahan di Nagari Kamang Hilia

No	Jorong	Lahan Pertanian		Hutan	Semak Belukar	Kolam	Total Luas
		Sawah	Ladang				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto Panjang	10.5	3	-	-	0.5	14
2	Dalam Koto	22.5	18	2	1.5	1	45
3	Dangau Baru	18	17.5	-	-	0.5	35
4	Batu Baraguang	15	10.5	1.5	1	-	28
5	Solok	10	4	1.5	0.5	-	16
6	Bancah	8	3	1	-	0.5	12.5
7	IV Kampusang	6	5	-	-	0.5	11.5
8	V Kampusang	3.5	5.5	-	-	0.5	9.5
9	Koto Nan Gadang	2	3	-	1	1	7
10	Binu	1	2	2	2	-	7
11	Balai Panjang	2	1.5	-	1	-	4.5
12	Guguak Rangpisang	3.5	2.5	1	0.5	1.5	9
13	Koto Kaciak	1.5	1.5	-	-	-	3
14	Nan VII	14	5	-	-	0.5	19.5
15	Pintu Koto	4	2	-	-	-	6
16	Ladang Darek	2	3	-	-	-	5
17	Joho	1	1	-	-	-	2
JUMLAH		129	90	9	7.5	5.5	234.5

Areal pertanian Nagari Kamang Hilia terdapat lahan basah ± 129 Ha dan kering ± 90 ha, lahan pertanian tersebut tersebar di ketujuh belas jorong, Jorong Dalam Koto merupakan jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu ± 45 Ha sementara jorong Joho yang paling sedikit yaitu ± 2 Ha.

b. Aliran Sungai

Wilayah Nagari Kamang Hilia dilalui oleh 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Tangalau. Sungai batang Agam melewati 7 jorong yang ada di Nagari Kamang Hilia, yaitu: Joho,

V Kampuang, Bancah, Solok, Binu, Guguak Rang Pisang dan Koto Kaciak, sementara Sungai Batang Tangalau melewati 2 jorong, yaitu Koto Panjang dan Dalam Koto. Selain itu dibeberapa jorong juga terdapat sungai ukuran kecil yang biasa disebut Banda.

c. Gugusan Bukit Barisan

Bukit barisan terletak membujur dari timur ke barat disebelah utara Nagari Kamang Hilia, mulai dari Jorong Dalam Koto, Batu Baraguang, Bancah, Solok, Binu dan Guguak Rang Pisang. Bukit Barisan terdiri dari kawasan Hutan Lindung, hutan produksi masyarakat, dan hutan rakyat.

d. Sumber Air

Sumber air di Nagari Kamang Hilia berasal dari sungai, sumur galian masyarakat serta air yang bersumber dari perbukitan yang ada di Nagari Kamang Hilia.

2.2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia/Demografi Nagari

Jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada tahun 2016 adalah 5.869 jiwa dengan 1.536 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Dalam Koto dengan jumlah Penduduk 712 jiwa dari seluruh jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Binu dengan jumlah penduduk 87 jiwa.

Tabel. 3
Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Kamang Hilia tahun 2017

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Jorong Koto Panjang	490	8.34
2	Jorong Dalam Koto	712	12.13
3	Jorong Dangau Baru	312	5.31
4	Jorong Batu Baraguang	311	5.29
5	Jorong Solok	258	4.39
6	Jorong Bancah	290	4.94
7	Jorong IV Kampuang	520	8.86

8	Jorong V Kampuang	350	5.96
9	Jorong Koto Nan Gadang	248	4.22
10	Jorong Binu	87	1.48
11	Jorong Balai Panjang	172	2.93
12	Jorong Guguak Rangpisang	222	3.78
13	Jorong Koto Kaciak	192	3.27
14	Jorong Nan VII	498	8.48
15	Jorong Pintu Koto	587	10.07
16	Jorong Ladang Darek	389	6.62
17	Jorong Joho	231	3.93
JUMLAH		5869	100%

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari 2017

2.2.4.1 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Struktur penduduk Nagari Kamang Hilia menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2016 dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 22-59 tahun sebesar 48,98% dari jumlah penduduk 5.198 orang, dilihat berdasarkan kelompok umur pada umumnya penduduk Kanagarian Kamang Hilia sebagian pada kelompok umur 22-59 tahun dan kelompok usia sekolah 7-15 tahun 16,50% sedangkan usia non produktif yaitu usia balita dan lanjut usia masing-masing sebanyak 9,48% dan 16,25%.

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru

2.2.4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia menurut jenis kelamin pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk 5.869 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 2.957 jiwa (50,38%) dan penduduk laki-laki berjumlah 2.912 jiwa (49,61 %).

Tabel. 3
Data Jumlah Penduduk Kamang Hilia menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Total
-----------	---------------	------------------	------------------	--------------

		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto Panjang	233	3,97	257	4,37	490	8,34
2	Dalam Koto	358	6,09	354	6,03	712	12,13
3	Dangau Baru	152	2,58	160	2,72	312	5,31
4	Batu Baraguang	152	2,58	159	2,70	311	5,29
5	Solok	134	2,28	124	2,11	258	4,39
6	Bancah	151	2,57	139	2,36	290	4,94
7	IV Kampuang	256	4,36	264	4,49	520	8,86
8	V Kampuang	185	3,15	165	2,81	350	5,96
9	Koto Nan Gadang	119	2,02	129	2,19	248	4,22
10	Binu	51	0,86	36	0,61	87	1,48
11	Balai Panjang	85	1,44	87	1,48	172	2,93
12	Guguak Rangpisang	105	1,78	117	1,99	222	3,78
13	Koto Kaciak	93	1,58	99	1,68	192	3,27
14	Nan VII	251	4,27	247	4,20	498	8,48
15	Pintu Koto	282	4,80	305	5,19	587	10,07
16	Ladang Darek	189	3,22	200	3,40	389	6,62
17	Joho	116	1,97	115	1,95	231	3,93
JUMLAH		2.912	100	2.957	100	5.869	100

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari 2017

Banyaknya jumlah penduduk Perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kanagarian Kamang Hilia, hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia, dan penduduk yang merantau rata-rata berusia 19 – 34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Kanagarian Kamang Hilia bekerja disektor pertanian dan usaha perabot.

2.2.4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk nagari Kamang Hilia pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Kamang Hilia.

2.2.4.4 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Kamang Hilia menurut mata pencaharian terdiri dari Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Industri perabot dan lain-lain berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Kamang Hilia banyak bekerja dari sektor pertanian yaitu sebanyak 1.900 jiwa dan Pedagang 300 jiwa, Usaha perabot/pertukangan dan pengrajin kerupuk sebanyak 550 jiwa dan yang paling sedikit bekerja pada sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyaknya penduduk Nagari Kamang Hilia bekerja disektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja disektor Perabot/pertukangan karena masyarakat Kamang Hilia telah turun temurun dalam usaha tersebut dan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Kamang Hilia.

2.2.5 Kondisi Sumber Daya Pembangunan

Sumber pembangunan yang telah ada di Nagari adalah berupa Jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pasar nagari, jaringan irigasi tersier (JIT) serta bangunan penunjang pemerintahan. Berikut daftar sumber daya pembangunan yang ada di Nagari Kamang Hilia:

Tabel. 4
Daftar Sumber Daya Pembangunan Nagari Kamang Hilia

No.	Nama Sumber Daya	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan		
	a. Jalan Propinsi	0	
	b. Jalan Kabupaten	2 ruas	
	c. Jalan Nagari	15 ruas	
	d. Jalan Lingkungan	25 ruas	
2.	Jembatan	8 unit	
3.	Sarana Pendidikan		
	a. PAUD/TK	4 unit	
	b. Sekolah Dasar	7 unit	
	c. SMP/MTs	1 unit	
	d. SMU	1 unit	
4.	Sarana Kesehatan		
	a. Pustu	2 unit	
	b. Polindes	1 unit	
	c. Posyandu	1 unit	
5.	Sanitasi & Irigasi		

	a. MCK umum b. IPAL KOMUNAL c. Pintu air d. Irigasi	2 unit 2 unit 6 unit 16.000 m	
6.	Air Bersih a. Tangki Air Bersih b. Mata Air c. SPAM	17 unit 20 unit 5 unit	
7.	Ekonomi a. Pasar Nagari	1 unit	Pasar Serikat

2.2.6 Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya

Sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber daya sosial budaya masyarakat yang ada di Nagari Kamang Hilia berupa adat dan budaya, rumah ibadah, sistem sosial, dll.

2.2.6.1 Agama

Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Nagari Kamang Hilia (100%). Sebagai penunjang pelaksanaan kehidupan beragama, di Nagari Kamang Hilia terdapat 10 (sepuluh) Mesjid dan 13 (tiga belas) Mushalla.

Tabel 5.
Jumlah Mesjid & Mushalla di Nagari Kamang Hilia

No.	Nama Jorong	Mesjid	Mushalla	Keterangan
1.	Koto Panjang	1	1	
2.	Dangau Baru	1	0	
3.	Dalam Koto	1	2	
4.	Batu Baraguang	1	0	
5.	Bancah	1	1	
6.	Joho	0	1	
7.	Pintu Koto	0	1	
8.	IV Kampuang	1	1	
9.	V Kampuang	0	1	

10.	Nan 7	0	2	
11.	Ladang Darek	0	1	
12.	Solok	1	0	
13.	Binu	0	1	
14.	Koto Nan Gadang	1	0	
15.	Balai Panjang	0	1	
16.	Koto Kaciak	1	0	
17.	Guguak Rang Pisang	1	0	
	Jumlah	10	13	

2.2.6.2 Kesenian

Di Kamang Hilia terdapat beberapa buah sanggar dan sasaran silat sebagai tempat berkreatifitas anak muda dalam melestarikan seni dan budaya anak nagari.

Tabel 6.
Jumlah Sanggar Seni di Kamang Hilia

No.	Nama Kegiatan	Bidang	Lokasi
1.	Sanggar Karih Galombang	Seni musik, tari & randai	Jor. Pintu Koto
2.	Sanggar Sapamenan	Seni musik, tari & randai	Jor. Pintu Koto
3.	Sanggar Siti Aisyah	Seni musik, tari & randai	Jor. IV Kampuang
4.	Sanggar Tesha	Seni Musik & Tari	Jor. Ladang Darek
5.	Sasaran Silek Kabau Jalang	Silat Tradisional	Jor. Dalam Koto

2.2.6.3 Sistem Sosial/Tatanan Masyarakat

Diatur oleh adat untuk menciptakan persatuan diantara anak nagari, “sarumpun bak sarai, saikek bak siriah, anak satu kemanakan surang, barek samo dipikua ringan samo dijinjang”

Klasifikasi masyarakat terdiri dari orang *ampek jinh* (empat jenis), yaitu: Pangulu, malin, manti dan dubalang

Tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai)

Yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab, namun tidak terlepas dari persatuan dan kesatuan *banagari*.

Dapat disebut juga ampek jinlh pusaka kebesaran atau Pusako martabat. Sedangkan pusako adalah harta. Yaitu, hutan tanah, sawah lading, pandam pekuburan, namanya “*ulayat*”.

Keistimewaan adat ini terletak pada orang berhindu, bersuku, bersako pusako, menurut pertalian darah ibu (matrilineal), dimana Pangulu, niniak mamak, kepala kaum, kepala waris dalam suatu kaum bersifat menjaga harta pusaka dan memelihara anak kemenakan dengan harta pusaka tersebut.

Segala sesuatu yang sejalan, yang bersangkutan dengan harta pusaka sebagai sumber ekonomi utama dalam suatu kaum, maka kekuasaanya dapat dikatakan terletak pada kaum ibu, atau boleh juga disebut *bundo kanduang*. Sebab harta pusaka ini turun temurun *dari niniak kepada mamak, dari mamak kepada kemanakan* dari pihak keturunan ibu

2.3 Kelembagaan Nagari

2.3.1 Pembagian Wilayah

2.3.1.1 Sebelum Perang Kamang 1908

Sebelum perang Kamang tahun 1908, diderah ini terdapat Pemerintahan *Kelarasan Kamang* yang terdiri dari 4 Nagari yaitu :

1. Nagari Kamang
2. Nagari Bukik
3. Nagari Suayan
4. Nagari Nagari Simalantiak

Angku Lareh berdomisili dan Kantor Pemerintahannya berada di Kamang. Setelah melalui pergolakan Perang Kamang tahun 1908 melawan penjajahan Belanda, dengan berbagai akal dari Pemerintah Belanda untuk mematahkan semangat perlawanan anak Nagari, maka kira-kira 1-2 tahun sesudah Perang Kamang dan mencegah daerah lain mengikuti jejak orang Kamang yang melawan penjajahan, maka pihak Belanda mengganti nama Nagari Kamang ini menjadi Nagari *Aua*

Parumahan. Sedangkan Nagari Bukik menjadi Nagari *Surau Koto Samiak*.

2.3.1.2 Setelah Perang Kamang 1908

Sekitar tahun 1915, Nagari Aua Parumahan hanya terdiri dari 7 Jorong/ kampung yang asal yaitu :

1. Kampuang Balai Panjang
2. Kampuang Kubang
3. Kampuang Rumah Tinggi
4. Kampuang Bawah Surian
5. Kampuang Tanjuang Mangkudu
6. Kampuang Pasia
7. Kampuang Taluak

Karena masih dalam cengkraman penjajah Belanda, maka pemerintah Belanda tetap menjalankan politik adu domba, dengan memecah Nagari Aua Parumahan menjadi 3 bagian dengan sebutan *patah*, yaitu Patah Hilia, Patah Tangah dan Patah Mudiak.

Patah Mudiak terdiri dari Jorong (Dusun) :

1. Mudiak (Koto Panjang)
2. Dangau Baru
3. Dalam Koto
4. Batu Baraguang
5. Bancah

Patah Tangah terdiri dari Jorong (Dusun)

1. J o h o
2. Pintu Koto
3. Nan Tujuah
4. IV Kampuang
5. V Kampuang

Patah Hilia terdiri dari Jorong (Dusun) :

1. S o l o k
2. Ladang Darek
3. Binu
4. Koto Nan Gadang
5. Balai Panjang
6. Koto Kaciak
7. Guguak Rang Pisang.

Begitulah seterusnya setelah melalui proses perobahan Pemeritahan, dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman penjajahan Jepang dan Indonesia merdeka.

2.3.1.3 Pasca Agresi Belanda ke-2

Sekitar tahun 1949 sesudah agresi Belanda kedua, maka Nagari Aua Parumahan kembali berganti nama menjadi Nagari Kamang Hilia, dan Nagari Surau Koto Samiak menjadi Nagari Kamang Mudiak. Pemerintahan Nagari dibawah seorang Kepala Pemeritahan yang disebut Wali Nagari.

Nama-nama dan masa jabatan Lareh/Kepala Nagari/Walinagari dan sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979:

No	Nama dan Gelar	Pangkat/Jabatan	Masa Jabatan	Ket.
1.	Dt Karando	Lareh	1870 – 1908	
2.	Dt Palindih	Lareh		
3.	Dt Siri Marajo	Penghulu Kepala	1906 – 1908	
4.	Dt Kayo	Penghulu Kepala	1908 – 1913	
5.	Dt Maradjo	Penghulu Kepala	1914 – 1922	
6.	Dt Nan Laweh	Kepala Negeri	1923 – 1926	
7.	Dt Sati	Kepala Negeri	1927 – 1928	
8.	A. Labai Sutan	Kepala Negeri	1929 – 1931	
9.	Dt Tan Maradjo	Kepala Negeri	1932 – 1936	
10.	Dt Mangkuto	Kepala Negeri	1937 – 1946	
11.	Maradjo	Walinagari	1946 – 1947	
12.	Dt Mangkudun	Walinagari	1947 – 1948	
13.	Dt Rajo Sikumbang	Walinagari Perang	1949	6 bl
14.	Dt Radjo Marah	Walinagari	1949 – 1950	
15.	Zainal Abidin	Walinagari	1950 – 1951	
16.	Haji Bustamam	Tepatan Kepala Wilayah Tilkam	1952 – 1958	
17.	M.K. St Batuah	Walinagari	1959	
18.	Dt Rajo Mangku	sda. (Luar)	1959 – 1961	
19.	Dt Bajanjang Batu	sda. (Dalam)	1961 – 1962	
20.	Jansima St Saidi	Kepala Negeri	1962 – 1965	

21.	Baratas St Sajatino	Kepala Negeri	1966 – 1970	
22.	M.K. St Batuah	Kepala Negeri	1971 – 1974	
23.	Arinal St Palimo	Walinagari	1974 – 1976	
24.	Muchlis Pangulu Sutan	Walinagari	1976	
25.	Tibran St Asa Batuah	Walinagari		
26.	Achyar Khatib Malano	Walinagari		

2.3.1.4 Sistem Pemerintahan Desa

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang memberlakukan kesamaan system Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia. System Pemerintahan Nagari dihapus diganti dengan Pemerintahan Desa. Maka Nagari kamang Hilia dipecah lagi menjadi 17 Desa yang merupakan peningkatan status Jorong yang ada.

Pada tahun 1990, berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat tahun 1988, tentang Penataan kembali Wilayah administrasi Pemerintahan Desa di Propinsi Sumatera barat, maka Desa yang 17 buah tadi disederhanakan menjadi 6 Desa yaitu:

1. Desa Kamang Sari, gabungan dari Desa Koto Panjang dan Desa Dangau Baru.
2. Desa Dalam Koto Batu Baraguang, gabungan dari Desa Dalam Koto dan Desa Batu Baraguang.
3. Desa Tangah, gabungan dari Desa Joho, Pintu Koto dan Nan VII
4. Desa Aua Parumahan, gabungan dari Desa IV Kampuang, V Kampuang dan Bancah.
5. Desa Hilia Lamo I, gabungan dari Desa Solok, Ladang Darek, Binu dan Koto Nan Gadang.
6. Desa Hilia Lamo, Koto Kaciak, Balai Panjang dan Guguak Rang Pisang.

Selanjutnya melalui Penataan Desa tahap 4, ke 6 Desa yang yang ada disederhanakan lagi menjadi 3 Desa yaitu :

1. Desa Kamang Barat, gabungan dari Desa Koto Panjang, Dangau

Baru, Dalam Koto dan Batu Baraguang.

2. Desa Kamang Tangah, gabungan dari Desa Joho, Pintu Koto, IV Kampuang, V Kampuang, Bancah, Nan VII.
3. Desa Kamang Timur, Gabungan dari Desa Koto Nan Gadang, Guguak Rang Pisang, Balai Panjang, Koto Kaciak, Ladang Darek, Solok dan Binu.

Semangat reformasi yang melanda tanah air, telah melahirkan Unda-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusul dengan lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan terakhir dijabarkan oleh Pemda Agam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Maka sistem Pemerintahan terendah di Sumatera Barat kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari, yang kita kenal dengan slogan *Babaliak Ka Nagari*.

Dengan diberlakukannya aturan ini, maka Desa Kamang Barat, Desa Kamang Tangah dan Desa Kamang Timur digabung kembali ke Pemerintahan Nagari Kamang Hilia dengan jumlah Jorong sebanyak 17 buah.

2.3.1.5 Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mengatur tata pemerintahannya sendiri sampai kepada tingkat terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat, hal ini direspon oleh Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se-Sumatera Barat, dengan pemberlakuan Perda tersebut maka sistem pemerintahan kembali ke sistem pemerintahan Nagari, maka pada tahun 2001 Desa-Desa yang ada di wilayah kenagarian Kamang Hilia bergabung menjadi Nagari Kamang Hilia. Dalam perjalannya sudah terjadi beberapa kali pergantian Walinagari sampai dengan saat ini, yaitu:

No.	Nama dan Gelar	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Safnis Bagindo Maralam	2001 – 2002	Penjabat
2.	Herman St Majo Indo	2002 – 2003	

3.	Baktiwan Dt Tundiko	2003 – 2006	Penjabat
4.	Zamharil Dt Bilang Kuniang	2006 – 2010	
5.	Mastur St Majo Lelo	2010 – 2016	
6.	Emi Fandra	2017	Penjabat
7.	Khudri Elhami Panduko Kayo	2017 – sekarang	

2.3.2 Struktur Organisasi Nagari

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

WALI NAGARI
KHUDRI ELHAMI, S.Pt

SEKRETARIS NAGARI
HANIF PUTRA

KASI PEMERINTAHAN
AFIZATUL WATNI

KASI KESEJAHTERAAN
REZNITA HANDAYANI

KASI PELAYANAN
KASNIDA

KAUR TU & UMUM
-

KAUR KEUANGAN
WENI FUTRIA MORI

KAUR PERENCANAAN
NILA AZTRI

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / WALI JORONG

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. JORONG IV KAMPUANG | : HUSNUL KHYAR |
| 2. JORONG V KAMPUANG | : IRWAN ST SARI ALAM |
| 3. JORONG PINTU KOTO | : WILSON ST PANGULU |
| 4. JORONG JOHO | : AULIA IRFANSYAH |
| 5. JORONG DANGAU BARU | : HUSNUL FUADI |
| 6. JORONG DALAM KOTO | : RUSBIAN |
| 7. JORONG BATU BARAGUANG | : AULIA HARDI RIUTAMA |
| 8. JORONG KOTO PANJANG | : YON HENDRI ST SATI |
| 9. JORONG BANCAH | : SYAFRAN JAMIL |
| 10. JORONG SOLOK | : ISHAQ |
| 11. JORONG LADANG DAREK | : SESRI YOZA |
| 12. JORONG NAN 7 | : RAMLI YUSMAN |
| 13. JORONG BALAI PANJANG | : TAUFIQ |
| 14. JORONG KOTO NAN GADANG | : MUSFAR |
| 15. JORONG BINU | : FAKHRUR ROZI |
| 16. JORONG KOTO KACIAK | : RISMAN HERI |
| 17. JORONG GUGUAK RANG PISANG | : JUN MIDWAR |

a. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NAGARI KAMANG HILIA

KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPD)

Ketua : MUKHYAR SYAF DT LELO MANGKUTO

Wakil Ketua : -

sekretaris : -

Anggota : 1. DENDI RINALDI DT RAJO IMBANG
2. EMDASMI MALIN MUDO
3. HERMI DT RAJO BASA
4. BETRI WIJAYA
5. ISNAHURIATI

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1 Masalah

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan nagari menggunakan sketsa nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan, maka telah dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi, beberapa permasalahan yang ada di Nagari Sipinang digambarkan sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari

- (1) Sub bidang kapasitas aparatur pemerintahan nagari:
 - a. Terbatasnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari.
 - b. Terbatasnya kemampuan anggota BAMUS.
 - c. Kurangnya jumlah aparatur pemerintahan nagari.
- (2) Sub bidang kependudukan :
 - a. Masih adanya penduduk Nagari Kamang Hilia yang belum memiliki akte kelahiran, KK serta KTP.
 - b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan membuat akte kematian/surat keterangan kematian.
- (3) Sub bidang administrasi dan data nagari :
 - a. Belum tersedianya peta Nagari Kamang Hilia maupun peta masing-masing jorong yang valid dan benar.
 - b. Masih adanya kekeliruan dalam pemetaan PBB.
 - c. Masih rendahnya kemampuan aparatur nagari dalam menyusun data nagari.
 - d. Belum optimalnya pengadaan dan pemanfaatan teknologi komputerisasi.
 - e. Belum tersedianya data nagari yang terintegrasi.
 - f. Belum adanya tata ruang nagari (eksisting Nagari).
 - g. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan BAMUS.
- (4) Sub bidang sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan :
 - a. Gedung kantor walinagari masih kantor bersama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

- b. Gedung kantor wali jorong (eks kantor desa) serta mobilernya banyak yang tidak layak pakai.
- c. Masih kurangnya tersedia sarana penunjang pelayanan pemerintahan.
- d. Belum tersedianya kantor BAMUS serta mobiler yang memadai.
- e. Belum terpenuhinya peralatan mobiler kantor walinagari.
- f. Belum tersedianya kendaraan roda empat untuk operasional pemerintahan nagari.
- g. Belum tersedianya kendaraan dinas bagi perangkat nagari, wali jorong, BAMUS.
- h. Belum adanya patok batas dan gerbang pada batas nagari.
- i. Batas antar jorong yang belum jelas dan belum dipatok.

(5). Sub Bidang Aset dan Pertanahan

- a. Aset nagari belum terdata dengan baik.
- b. Masih banyak tanah milik pribadi, tanah ulayat, pusako tinggi serta pusako randah yang belum disertifikasi serta lemahnya bukti kepemilikan.
- c. Nama-nama pada SPPT masih banyak yang belum melakukan balik nama sesuai dengan kepamilikan.

3.1.2 Permasalahan di bidang pelaksanaan pembangunan

(1) Sub bidang infrastruktur jalan:

- a. Belum adanya darinase sepanjang jalan utama di nagari baik di jalan Kabupaten maupun jalan nagari.
- b. Pemeliharaan jalan tidak dilaksanakan secara berkala.
- c. Masih terdapat wilayah pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani.
- d. Adanya kerusakan jalan kabupaten yang ada di nagari Kamang Hilia.
- e. Ruas jalan penghubung antar nagari dan kecamatan masih kecil dan belum ada drainase.
- f. Adanya kerusakan jalan nagari pada beberapa ruas.
- g. Sebanyak 197 KK masyarakat belum terakses dengan air bersih.

(2) Bidang kesehatan:

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan sarana/fasilitas umum seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) yang ada.

- b. Umumnya masyarakat belum memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga.
- c. Belum adanya sumur resapan dipemukiman masyarakat.
- d. Tembok penahan tanah dan pagar poskesri Lubuak belum ada.
- e. Belum semua jorong memiliki gedung Posyandu yang representatif.
- f. Belum semua masyarakat terdaftar sebagai anggota BPJS
- g. Masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial.
- h. kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu.
- i. masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi.

(3) Bidang Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan, daur ulang dan pemanfaatan limbah.
- b. Masyarakat masih membakar dan juga membuang sampah sembarangan.
- c. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai yaitu batang agam dan batang tangalau serta aliran banda.
- d. Belum terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- e. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah sementara dan juga Bank Sampah.
- f. Belum adanya sarana prasarana pengolahan sampah organik dan an organik.
- g. Belum adanya terasering di jorong-jorong dan nagari.
- h. Masih adanya lahan yang belum ditanami.
- i. Belum adanya lembaga/kelompok masyarakat yang mengelola sungai.

(4) Sub bidang pendidikan

- a. Belum tersedianya gedung sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK yang representatif di beberapa jorong.
- b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana permainan untuk penunjang PAUD dan TK.
- c. Terbatasnya honor bagi guru PAUD dan TK.
- d. Sarana penunjang gedung PAUD/TK yang masih kurang, seperti halaman, pagar, dll.

- e. Sarana penujang gedung sekolah dasar yang masih kurang, seperti halaman, pagar, dll.
- f. Belum tersedianya bea siswa bagi murid-murid berprestasi.
- g. Kurangnya kegiatan pendidikan yang berorientasi prestasi.
- h. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang sejarah nagari.

(5) Sub bidang ekonomi

- a. Belum terkelolanya pasar nagari dengan baik.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana pasar nagari.
- c. Belum adanya Bumnag.
- d. Showroom/wisma pamer produk nagari belum tersedia.
- e. Belum optimalnya pengelolaan kebun bibit nagari.
- f. Sarana prasarana kebun bibit nagari belum lengkap.
- g. Belum adanya mesin pengolahan kakao, jeruk, dan hasil pertanian lainnya.
- h. Belum terkelolanya kolam ikan milik masyarakat.
- i. Belum berkembangnya usaha peternakan masyarakat
- j. Pengadaan mesin pakan ternak.
- k. Belum adanya pembangunan dan pemeliharaan objek wisata nagari.
- l. Belum terdatanya potensi yang bisa dijadikan objek wisata nagari.
- m. Belum adanya kelompok sadar wisata yang mengelola objek wisata.
- n. Masih sering terjadi kelangkaan pupuk.

3.1.3 Permasalahan di bidang pembinaan masyarakat

(1) Sub Bidang Pembinaan lembaga masyarakat

- a. Belum maksimalnya peran lembaga kemasyarakatan.
- b. Belum maksimalnya peran kelompok-kelompok masyarakat.
- c. Masih lemahnya kapasitas pengurus dan anggota lembaga serta kelompok masyarakat.

(2) Sub bidang kamtibmas

- d. Belum tersedianya sarana prasarana kamtibmas di nagari dan jorong.
- e. Masih kurangnya kapasitas dan peran masyarakat dalam pelaksanaan kamtibmas.

(3) Sub bidang Agama

- a. Kapasitas Guru Agama masih kurang.
- b. Pembinaan Tenaga Guru TPA/MDTA masih kurang.

- c. Bangunan Mesjid dan Mushalla masih ada yang belum rampung dan rusak.
- d. Sarana pendukung Mesjid dan Mushalla masih kurang seperti pagar, WC, dll.
- e. Tenaga garin, imam serta khatib yang sudah mulai langka.
- f. Pembangunan gedung TPA/MDTA yang permanen dan representatif.
- g. Honor Guru Tenaga Guru TPA/MDTA sangat kecil.
- h. Belum terdatanya masyarakat yang bisa dan buta tulis baca Al Qur'an.
- i. Sanitasi mesjid dan mushalla masih belum bagus.
- j. Kurangnya kegiatan peringatan hari besar Agama Islam.
- k. Belum adanya pelaksanaan MTQ tingkat Nagari antar jorong dan antar MDTA/TPA.
- l. Kurangnya pembinaan terhadap remaja mesjid.
- m. Belum adanya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan rumah tahfizh nagari.
- n. Belum berjalannya secara penuh Gerakan Agam Madani.
- o. Kurangnya tenaga/orang yang mampu untuk menyelenggarakan jenazah.
- p. Belum seragamnya kurikulum pembelajaran di TPA dan MDTA.
- q. Masih belum terfasilitasinya lembaga keagamaan yang ada dinagari.

(4) Sub bidang olah raga dan kepemudaan

- a. Belum adanya sarana dan prasarana olah raga nagari.
- b. Belum adanya turnamen olah raga yang rutin dilaksanakan ditingkat nagari.
- c. Kurangnya club olah raga nagari sesuai dengan cabang olah raga.
- d. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda nagari.
- e. Belum adanya pelatihan soft skill dan keterampilan lainnya bagi pemuda.

(5) Sub bidang adat dan seni budaya

- a. Lemahnya pemahaman adat oleh generasi muda.
- b. Mulai hilangnya seni budaya anak nagari.
- c. Kurang berfungsinya lembaga adat karena digerus arus modernisasi.

- (6) Sub bidang kesejahteraan sosial
- Masih terdapat rumah masyarakat yang tidak layak huni.
 - Masih adanya masyarakat yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin.
 - Kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas dan gangguan kejiwaan.

3.1.4 Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat

- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan peternakan.
- Terbatasnya kemampuan dan keterampilan perangkat nagari dalam bidang kearsipan, terbatasnya kemampuan aparatur nagari dalam pengelolaan administrasi keuangan.
- Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga nagari, masih terbatasnya keterampilan dan kemampuan kelompok perempuan.
- Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
- Kurangnya sosialisasi terkait dengan kebencanaan.
- Kurangnya pembinaan di bidang perkoperasian.
- Kurangnya modal bagi kelompok usaha.
- Belum optimalnya kinerja pengurus BMT.
- Belum optimalnya kegiatan yang dikelola oleh Gapoktan.
- Belum adanya kerajinan berbahan baku lokal.
- Kurangnya pelatihan bagi masyarakat kurang mampu untuk peningkatan kapasitas dan ekonominya.
- Kurangnya pelatihan bagi kelompok pengrajin lokal.
- Kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan KDRT.
- Belum adanya pelatihan tentang paralegal bagi kelompok masyarakat.
- Belum adanya bazaar dan pameran produk UMKM dan pelaku usaha di Nagari.
- Masih belum maksimalnya peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Kurangnya pembinaan terhadap dasa wisma.
- Belum adanya lomba PKK dan dasawisma di nagari.
- Kurangnya PKK nagari dalam mengikuti lomba yang ada baik tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun propinsi serta nasional.

- (20) Belum lengkapnya administrasi dan buku-buku PKK.
- (21) Kurangnya pelatihan tataboga, tata busana dan tata laksana rumah tangga.
- (22) Kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Forikan, menu B2SA serta kegiatan lainnya.

3.1.5 Kejadian tak terduga

- (1) Terjadinya kebakaran rumah penduduk.
- (2) Terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- (3) Terjadinya bencana banjir dan tanan longsor.
- (4) Terjadinya gagal panen massal.
- (5) Kejadian luar biasa lainnya.

3.2 Potensi

Potensi Nagari

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta analisa yang dilakukan dapat diketahui dalam pengembangan pembangunan Nagari Kamang Hilia dimasa yang akan datang dalam mewujudkan Visi dan Misi Nagari yaitu “Masyarakat Kamang Hilia makmur, Beradap dan Islami”.

3.2.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Kamang Hilia ada terdiri dari :

3.2.2 Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang ada di Nagari Kamang Hilia yaitu TK, SD, dan SLTA, keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumberdaya Manusia penduduk Nagari Kamang Hilia untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, untuk lebih jelasnya potensi yang dimiliki dibidang pendidikan di Nagari Kamang Hilia dapat dilihat sebagai berikut :

3.2.2.1 Taman Kanak – Kanak

Pendidikan TK merupakan pendidikan persiapan yang dilakukan setiap anak sebelum memasuki sekolah dasar, dengan berkembangnya dunia

pendidikan saat ini yang mengacu kepada KTSP (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan diiringi peningkatan perekonomian masyarakat keberadaan TK sangat diperlukan, hal ini dapat dilihat bahwa kualitas murid-murid SD yang mempunyai Basis pendidikan TK akan berbeda tingkat kemampuannya dengan murid SD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan TK, dilihat dari pengamatan di lapangan mutu pendidikan dan fasilitas yang dimiliki TK di Nagari Kamang Hilia belum memadai, karena di Nagari Kamang Hilia hanya terdapat 2 buah TK.

Tabel. 5

Data sekolah Taman Kanak-Kanak di Nagari Kamang Hilia

No	Nama Sekolah	Jorong	Jlh Guru (orang)	Jlh Murid (orang)	Rasio Guru dan Murid
1	Mekar	Dangau Baru	3	25	8 : 1
2	Aisyiah	IV Kampusang	4	42	10 : 1

Tabel. 6

Sarana dan Prasarana TK di Nagari Kamang Hilia tahun 2017

No	Nama Sekolah	Lokasi/ Jorong	Sarana dan Prasarana				
			Gedung	Jumlah Ruang	Tempat Bermain	Alat Bermain	Trasportasi /Antar Jemput
1	Mekar	Dangau Baru	Ada	2	ada	ada (belum lengkap)	Tidak ada
2	Aisyiah	IV Kampusang	Ada	1	ada	ada (belum lengkap)	Tidak ada

Menurut tabel di atas bahwa jumlah guru, murid , sarana dan prasarana yang dimiliki masih jauh dari harapan, untuk pengembangan TK dimasa yang akan datang perlu pembenahan secara bertahap dan menyeluruh.

3.2.1.1.1 Pendidikan Dasar

3.2.1.1.1 Sekolah Dasar (SD)

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, Sekolah pendidikan dasar yang ada di nagari Kamang Hilia terdapat 5 sekolah dasar yang dapat menampung anak sebanyak lebih kurang 545 orang.

Tabel . 7

Data Sekolah Dasar di Kanagarian Kamang Hilia Tahun Ajaran 2016/2017

No	Nama Sekolah	Jlh Guru (orang)	Jlh Murid (Orang)	Rasio Guru dan Murid	Ket
1	SDN 01 Tangah	14	213	1 : 16	
2	SDN 06 Kamang Sari	10	93	1 : 10	
3	SDN 09 Hilia Lamo	9	89	1 : 11	
4	SDN 17 Cegek	9	106	1 : 13	
5	SDN 20 Tarok	8	44	1 : 5	

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio perbandingan guru dan murid rata-rata belum mencukupi betul yang mana sesuai dengan standar nasional pendidikan tentang rasio guru dan murid yaitu 1 : 30 (1 orang guru 30 murid) namun kecukupan rasio belum menjamin keberhasilan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan akan tetapi ditentukan beberapa faktor diantaranya yaitu :

1. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang seperti lapangan olahraga dan ruangan Komputer.
2. Peran masyarakat dan Pemerintahan Nagari memberikan dukungan kepada pihak sekolah
3. Perlu kesamaan pandangan antara pihak sekolah, komite sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar secara baik sesuai dengan penerapan KTSP.
4. Pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajemen yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

3.2.1.1.2 Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP)

Di Nagari Kamang Hilia belum terdapat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), di keranakan sekolah tersebut terdapat di Kecamatan Kamang Magek yaitu terletak di Nagari Magek dan seboro dari para pelajar di SLTP 1 Kamang Magek berasal dari Nagari Kamang Hilia.

3.2.1.1.3 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

Di Nagari Kamang Hilia terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTsN) yang berada di Jorong IV Kampuang dengan jumlah murid 301 orang terdiri dari 20 kelas dengan jumlah guru 34 orang, keberadaan MTsN ini memberikan konstribusi untuk menampung anak-anak tamatan SD di jorong-jorong untuk melanjutkan ke sekolah menengah dengan kurikulum berbasis Agama dari depag.

3.2.1.1.4 Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA)

Di Nagari Kamang Hilia terdapat satu buah SLTA yaitu SMA Negeri 1 Kamang Magek yang berlokasi di Jorong Pintu Koto dan merupakan satu-satunya sekolah SLTA yang ada di Nagari Kamang Hilia bahkan Kecamatan Kamang Magek, sekolah tersebut berdiri sejak tahun 2000. Kondisi SMA Negeri I Kamang Magek saat ini tercatat dengan jumlah kelas sebanyak 9 lokal yang dapat menampung murid sebanyak 247 orang dengan jumlah guru 32 orang dan pegawai tata usaha 4 orang dengan jumlah lulusan 74 orang dengan predikat lulus 94 % sampai dengan 100 % yang diterima di perguruan tinggi orang 40 % dari jumlah lulusan, dengan prestasi di tahun 2010 peringkat 3 ditingkat Kabupaten pada jurusan IPA dan peringkat 6 pada Jurusan IPS.

Luas sekolah SMA 1 Kamang Magek 1.550 m² dan yang dipakai untuk bangunan sekolah 1.000 m² dan masih tersisa 550 m² dari sisa luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penataan lingkungan dan perkebunan serta sarana olah raga.

Melihat dari kondisi diatas serta sarana dan prasarana, luas lahan dan tata letak yang kondusif, SMA N 1 Kamang Magek ini dapat dikembangkan yang tidak terlepas dari kualitas guru serta partisipasi orang tua menuju sebuah sekolah unggulan.

3.2.2. Pendidikan Agama

Nagari Kamang Hilia yang berpenduduk 100 % memeluk Agama Islam sesuai dengan Perda no.05 tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi harus bisa membaca Alqur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat bisa merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi di Nagari Kamang Hilia berkembang sekolah agama mulai dari MDA/TPQ.

3.2.2.1 Pendidikan MDA/TPQ

Sekolah MDA/TPQ merupakan pendidikan agama yang diberikan kepada setiap anak di Nagari Kamang Hilia rata-rata yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) untuk memberikan bekal Agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan siswa/i yang bisa tulis baca Al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia.

Tabel . 8
Data MDA/TPQ di Kanagarian Kamang Hilia

No	Nama MDA/TPA	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru Dan Murid
1	MDA Syuhada	2	28	1 : 14
2	MDA Zulfa	7	95	1 : 14
3	MDA Nurul Yaqin	1	18	1 : 18
4	MDA Ridha	1	22	1 : 22
5	MDA Istiqlal	3	18	1 : 6
6	TPA Khazatul 'Ulum	1	19	1 : 19
7	MDA Syuhada'	2	17	1 : 9
8	MDA Sovia	2	27	1 : 13
9	MDA Nurul Ikhsan	1	30	1 : 15
10	MDA Miftahul Ulum	1	27	1 : 27
11	TPA Al Falah	1	23	1 : 23
12	TPA Hilia Lamo	1	15	1 : 15
14	MDA Muhammadiyah	5	29	1 : 6
JUMLAH		28	361	1 : 13

Dilihat dari tabel di atas bahwa rasio perbandingan guru dengan murid bervariasi antara 1 : 6 dan 1 : 27 hal ini terjadi karena tidak meratanya pengelolaan MDA/TPA di Nagari Kamang Hilia yang juga berpengaruh terhadap kualitas lulusan MDA dan yang menjadi kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya honor guru dan berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu MDA. Adapun status kepemilikan tempat belajar anak-anak MDA/TPA adalah rata-rata milik masyarakat.

3.2.3. Kesehatan dan Lingkungan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh program Nasional yang ditindak lanjuti program Pemerintah Kabupaten agam menuju agam sehat tahun 2010.

Untuk mewujudkan program Kabupaten tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dimulai dari aparatur pemerintah daerah, pemerintah nagari terutama sekali dukungan dan peran aktif dari masyarakat, peran serta masyarakat dalam mendukung program kesehatan ini akan membawa pengaruh positif kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel. 9
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Nagari Kamang Hilia

N o	Jorong	Poskesri	Polindes	Posyandu	Dokter/ perawat	Bidan
1	Koto Panjang			1		
2	Dalam Koto			1		
3	Dangau Baru		1	1		1
4	Batu Baraguang			1		
5	Solok			1		
6	Bancah			1		
7	IV Kampuang			1		
8	V Kampuang			1		
9	Koto Nan Gadang			1		
10	Binu			1		
11	Balai Panjang			1		
12	Guguak			1		

	Rangpisang						
13	Koto Kaciak			1			
14	Nan VII	1		1			
15	Pintu Koto			1			
16	Ladang Darek		1	1			1
17	Joho			1			
JUMLAH		1	2	17			2

Tabel. 10
Data Penduduk Yang mendapatkan Pelayanan Dari Puskesmas

No	Jorong	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	WUS	Bayi	Balita	Bumil
1	Koto Panjang	434	116	23	4	13	2
2	Dalam Koto	645	134	34	4	40	2
3	Dangau Baru	268	61	3	-	14	-
4	Batu Baraguang	283	66	19	4	19	2
5	Solok	239	60	6	1	12	-
6	Bancah	361	75	20	3	20	-
7	IV Kampuang	462	124	15	10	32	1
8	V Kampuang	267	76	4	1	18	-
	Koto Nan	186					
9	Gadang		56	5	4	14	-
10	Binu	72	23	4	-	9	1
11	Balai Panjang	154	44	9	1	5	-
	Guguak	201					
12	Rangpisang		73	7	1	13	-
13	Koto Kaciak	175	46	8	1	11	-
14	Nan VII	466	146	28	5	23	2
15	Pintu Koto	495	151	16	5	35	-
16	Ladang Darek	373	109	2	4	28	-
17	Joho	217	59	2	4	10	-
JUMLAH		5198	1473	205	52	316	10

Dari data diatas jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Kamang Hilia belum memadai, karena sarana dan prasarana yang ada masih terbatas, apalagi Posyandu yang ada kondisinya sangat memprihatinkan, dari jumlah

17 Posyandu, 58.82% menumpang diteras rumah penduduk dan belum ada satupun Posyandu yang representatif, sebagaimana yang dapat dilihat dari kegiatan kesehatan sebagai berikut :

3.2.3.1 Poskesri

Di Nagari Kamang Hilia pada tahun 2010 dibangun gedung poskesri yang pada saat belumlah berfungsi betul karena minimnya sarana dan prasarana pada poskesri tersebut dan tenaga medis yang cuma satu orang bidan, sehingga para masyarakat yang ingin berobat kesana tidak terlayani sebagaimana mestinya.

3.2.3.2 Polindes

Nagari Kamang Hilia terdapat 2 Polindes yang pertama terletak di Jorong Dangau Baru dan di Jorong Ladang darek kedua polindes tersebut sangat aktif untuk memberikan pelayanan kesehatan namun kondisi sarana dan prasarana sangat terbatas.

3.2.3.3 Posyandu

Selain sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas, postu, praktik bidan Nagari Kamang Hilia juga memiliki Posyandu sebanyak 17 buah yang tersebar di tujuh belas jorong, posyandu yang ada memiliki kader yang aktif sebanyak 51 orang. Pelaksanaan Posyandu yang ada saat ini menggunakan kantor jorong, teras rumah penduduk. Dan belum mempunyai posyandu yang layak dan mandiri, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan melalui posyandu masih rendah

3.2.3.4 Kesehatan Lingkungan

Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu upaya pencegahan dari berbagai gangguan kesehatan atau penyakit khususnya penyakit berbasis masyarakat atau terkait dengan lingkungan yang bersih dan sehat seperti Diare , keracunan, TBC, Infeksi saluran Pernapasan (ISPA) terutama pada balita, demam berdarah (DBD), malaria, rabies dan lain-lain.

Tingkat Kesadaran Penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Kamang Hilia belum memenuhi harapan hal ini terlihat dalam hal pengelolaan sampah, masih banyak kebiasaan masyarakat membuang sampah disembarang tempat atau ke alur banda, begitu juga disekolah-sekolah, karena belum adanya sarana umum seperti bak sampah.

3.2.4. Pemerintah Nagari

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 31 tahun 2001 tentang Pemerintahan nagari yang dimulai tahun 2002, maka Pemerintahan Nagari Kamang Hilia telah menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya menghimbau serta peranan lembaga adat nagari/KAN dan lembaga lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari, maka tugas pemerintahan nagari adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu saja harus didukungan dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur dan kelembagaan yang cukup dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat .

3.2.5. Perekonomian

Yang mendukung perekonomian Nagari Kamang Hilia secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Faktor Alam (Sumberdaya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumberdaya manusia)
3. Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Kamang Hilia.

3.2.6. Pertanian Dan Perkebunan

3.2.7. Industri

Industri yang berkembang dikanagarian Kamang Hilia pada umumnya industri kecil, yaitu industri perabot dan Kerupuk Kamang, dilihat dari perkembangan industri tersebut maka kontribusi yang diberikan di kanagarian Kamang Hilia belum cukup mendukung karena minimnya bahan baku yaitu kayu dan ubi.

Industri perabot tersebut merupakan pekerjaan masyarakat Nagari Kamang Hilia sejak dahulu adapun jenis produk yang dihasilkan adalah

Lemari, Kursi, Meja, dan perabotan rumah tangga lainnya dengan jumlah tenaga kerja sekitar 400 orang.

Dan Industri Rumah Tangga yaitu Pembuatan Kerupuk Kamang juga tersebar diseluruh jorong di Nagari Kamang hilia dengan jumlah sekitar 150 orang pengrajin kerupuk.

Hasil kerajinan industri perabot dan kerupuk Kamang dipasarkan di Bukittinggi, dan khusus untuk industri Kerupuk Kamang pemasarannya belumlah begitu lancar dikarenakan belum dikenalnya oleh masyarakat luas dan belum adanya hak paten untuk pemasaran produk kerupuk Kamang tersebut.

3.2.8. Perdagangan

Nagari Kamang Hilia terdapat pasar serikat antara Nagari Magek dan Kamang Hilia yaitu Pasar serikat Pakan Salasa yang terletak di Jorong Pintu Koto, pasar ini ramai dikunjungi oleh penduduk/konsumen baik dari penduduk Nagari Kamang Hilia sendiri maupun dari Nagari Magek, hasil yang dipasarkan di pasar serikat Pakan Salasa lebih dominan hasil pertanian disamping hasil industri.

3.2.9. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat minang kabau yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Kamang Hilia selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari.

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar

masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.10. Agama

Seiring dengan kebijakan pemerintah propinsi sumatera barat “babaliak Kanagari” di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Kamang Hilia untuk membangun mesjid, mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan kegamaan.

Tabel. 12
Sarana dan prasarana ibadah di kanagarian Kamang Hilia

No	Jorong	Sarana dan Prasarana			Jumlah
		Mesjid	Mushalla	MDA/TPA	
1	2	3	4	5	6
1	Koto Panjang	1		1	2
2	Dalam Koto	1	2	1	3
3	Dangau Baru	1		1	2
4	Batu Baraguang	1		1	2
5	Solok	1		1	2
6	Bancah	1		1	2
7	IV Kampuang	1	1	1	2
8	V Kampuang		1	1	2
9	Koto Nan Gadang	1		2	3
10	Binu		1		1
11	Balai Panjang		1		1
12	Guguak Rangpisang	1		1	2
13	Koto Kaciak	1			1
14	Nan VII		2	1	3
15	Pintu Koto		1		1
16	Ladang Darek		1	1	2
17	Joho		1	1	2
JUMLAH		10	11	14	33

3.2.11. Perantau

Salah satu ciri masyarakat Nagari Kamang Hilia dan juga telah menjadi kebiasaan sebagaimana budaya masyarakat minangkabau yaitu merantau. Masyarakat Nagari Kamang Hilia yang merantau lebih didominasi oleh penduduk laki-laki yang berumur 18 tahun s/d 45 tahun dengan kota tujuan yang beragam dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Anak Nagari Kamang Hilia yang merantau tersebut tergabung dan dihimpun dalam wadah Kamang Saiyo.

Tujuan anak Nagari Kamang Hilia merantau adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan berdagang, menjadi pegawai (instansi swasta/Negeri) dan sebagainya. Bagi anak Nagari Kamang Hilia yang berhasil di perantauan mereka memberikan konstribusi terhadap pembangunan kampung halaman baik berupa bantuan moril maupun materil.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI, PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari, harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan empat bidang kegiatan Nagari, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Kamang Hilia dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1 VISI NAGARI

Visi merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Kamang Hilia sehingga 6 (enam) tahun ke depan Nagari Kamang Hilia mengalami suatu perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu, maka dirumuskan visi Nagari Kamang Hilia 6 (enam) tahun kedepan, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA NAGARI KAMANG HILIA NAN MANDIRI DAN MADANI
MELALUI NAGARI MEMBANGUN ”**

- 1. Mandiri**, mengandung pengertian bahwa masyarakat Nagari Kamang Hilia mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada potensi keunggulan lokal.

2. **Masyarakat Madani**, mengandung makna masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun berbudaya tinggi, baik terhadap sesama manusia atau dengan alam sekitarnya dengan mengacu kepada nilai-nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
3. **Nagari Membangun**, dengan pengertian bahwa menempatkan Nagari sebagai subyek pembangunan melalui pengakuan atas hak asal usul Nagari (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Nagari (subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama pengaturan Nagari, dengan menitik beratkan pembangunan manusianya.

4.2 MISI

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih** berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. **Mengembangkan surau dan mesjid berorientasi mutu**, sehingga surau berkembang menjadi pusat layanan unggulan yang menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas.
3. **Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan** bagi anak Nagari serta mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal menuju Kamang Hilia sebagai Nagari Pendidikan.
4. **Melaksanakan pemberdayaan masyarakat** strategi 3 (tiga) daya :
 - a) Pengembangan Lumbung Ekonomi Rakyat, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat nagari sesuai potensi ekonomi nagari dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, peternakan, home industry, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, serta pariwisata, melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
 - b) Penguatan Jaring Komunitas Wiranagari, yaitu penguatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat nagari dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan nagari sehingga muncul Sumber daya manusia yang tangguh.

c) Pengembangan lingkar Budaya Nagari, yaitu pengembangan budaya, tradisi, dan kearifan lokal sebagai pengikat solidaritas dan kegotongroyongan dalam seluruh sektor kehidupan Nagari.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis Nagari secara berkesinambungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian Nagari berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam upaya menciptakan keseimbangan alam.

6. Meningkatkan pelestarian kerukunan kehidupan bernagari sesuai falsafah “*ka mudiaik sa antak galah, ka hilia sarangkuah dayuang, sasuai lahie jo bathin, sasuai muluik jo hati*”.

7. Mengembangkan jaringan kemitraaan Nagari dengan lembaga pemerintahan lainnya, organisasi perantau, dan mendorong peningkatan Kerjasama Antar Nagari serta lembaga profit dan non profit lainnya.

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Arah kebijakan pembangunan Nagari adalah hasil dari pengkajian secara komprehensif terhadap potensi dan masalah Nagari, isu strategis Nagari/Kabupaten/Provinsi/Nasional, visi, misi dan strategi pembangunan Nagari yang akan menghasilkan program dan kegiatan prioritas bagi Nagari untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kemandirian Nagari Kamang Hilia.

Arah kebijakan umum Nagari Kamang Hilia juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Nagari untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Nagari pada RPJM Nagari ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Agam tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016- 2021.

4.3.1 Arah Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Penguatan tata kelola pemerintahan nagari;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari;
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan nagari;
- 4) Peningkatan akses data dan informasi serta komunikasi publik yang akurat dan terkini;
- 5) Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nagari;
- 6) Peningkatan kualitas produk hukum nagari;

- 7) Optimalisasi pelayanan masyarakat dengan mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 8) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- 9) Penegasan tapal batas nagari.

4.3.2 Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan nagari berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dan lingkungan masyarakat .
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga nagari.

4.3.3 Arah Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan bidang Agama Islam.
- 2) Penguatan keluarga kurang mampu, lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Pembinaan olah raga.
- 5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 6) Pembinaan lembaga adat.
- 7) Pembinaan kesenian dan sosial budaya.

4.3.4 Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi walinagari, perangkat nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- 2) Pelatihan Teknologi Tepat Guna.
- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- 4) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

- 5) Peningkatan kapasitas kelompok tani, perempuan, masyarakat miskin, pengrajin, pemuda, siaga bencana, usaha ekonomi produktif dan lainnya.
- 6) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
- 7) Penyelenggaraan gelar produk kerajinan/produksi industri rumah tangga.

4.4 Proritas Rencana Program Pembangunan Nagari

Kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

4.4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Nagari.
2. Kegiatan penunjang operasional Pemerintahan Nagari.
3. Kegiatan penunjang operasional Bamus Nagari.
4. Kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari.
5. Kegiatan pendataan Nagari.
6. Kegiatan Penyusunan tata ruang Nagari.
7. Penyelenggaraan musyawarah Nagari.
8. Kegiatan pengelolaan informasi Nagari.
9. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari.
10. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Nagari.
11. Penyelenggaraan kerjasama antar nagari.
12. Pembangunan sarana prasarana kantor pemerintahan Nagari.

4.4.2 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Nagari.

4.4.2.1 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Nagari.

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari antar jorong dan jalan lingkung (pembukaan dan pengerasan).
2. Peningkatan jalan nagari antar jorong (pengcoran/rabat beton)
3. Pengadaaan sarana dan prasarana jalan nagari berupa rambu-rambu, penunjuk jalan serta lampu jalan.
4. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan, yaitu gorong-gorong dan plat deker.
5. Kegiatan perambahan jalan nagari.

6. Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari ke wilayah pertanian.
7. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan irigasi tersier.
8. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga dan lapangan nagari.

4.4.2.2 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan.

- 1) Pemasangan jaringan pipa dari sumber air bersih ke penampungan dan ke kran umum.
- 2) Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan bak penampungan dan penyaringan.
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sumur serta sumber mata air lainnya.
- 4) Pemasangan jaringan dan pemeliharaan dari penampungan ke rumah penduduk.
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air/drainase.
- 6) Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
- 7) Pendirian pengelolaan sampah.
- 8) Pendirian bank sampah nagari.
- 9) Pembangunan dan atau pemeliharaan gedung posyandu, poskesri dan polindes.
- 10) Pengadaan alat kesehatan, APE serta pendukung lainnya.
- 11) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- 12) Pembinaan kesehatan masyarakat.
- 13) Program kesehatan penduduk miskin.
- 14) program peningkatan kesehatan anak balita.
- 15) Program perbaikan gizi masyarakat.

4.4.2.3 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.
2. Bantuan transportasi pendidik/guru PAUD/TK non PNS.
3. Peningkatan kapasitas pendidik PAUD.
4. Pembangunan taman bacaan masyarakat/perpustakaan nagari dan jorong.

5. Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan seperti buku dan ruang baca.
6. Biaya pengelolaan taman bacaan.
7. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan masyarakat.
8. Pelaksanaan program life skill bagi masyarakat termasuk masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.
9. Pengembangan sanggar seni dan budaya dengan pengadaan sarana dan prasarana kesenian tradisional.
10. Pemberian beasiswa bagi anak keluarga kurang mampu yang tidak memperoleh beasiswa melalui KIS dan beasiswa lainnya.
11. Pemeliharaan cagar budaya dan situs sejarah nagari.

4.4.2.4 Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.

1. Pengelolaan pasar nagari.
2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar nagari.
3. Pengembangan BUMNAG.
4. Peningkatan kapasitas pengelola BUMNAG.
5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan nagari.
6. Pengembangan kebun bibit nagari.
7. Pengelolaan usaha hutan nagari.
8. Pengembangan dan pemeliharaan ikan serta pemberian.
9. Pengembangan usaha ternak masyarakat.
10. Pengembangan, pembangunan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan instalasi biogas.
11. Pembangunan showroom/wisma produk nagari.
12. Pembentukan dan pengembangan objek wisata nagari.

4.4.2.5 Sub Bidang pelestarian lingkungan hidup.

1. Pembersihan daerah aliran sungai dari semak dan sampah.
2. Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Agam dan Batang Tangalau.
3. Pembuatan terasering serta penanaman disepanjang aliran sungai batang agam dan tangalau serta banda.
4. Penanaman dan pemeliharaan hutan.
5. Perlindungan mata air.

6. Pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai dan lingkungan.

4.4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan.
2. Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan.
3. Pembiayaan kegiatan yang direncanakan oleh lembaga.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pembinaan kegiatan bidang agama.
6. Mewujudkan gerakan nagari madani
7. Perbaikan mesjid dan mushalla.
8. Pembayaran belanja jasa imam dan gharin mushalla.
9. Pembayaran jasa guru TPA/MDTA.
10. Pelaksanaan MTQ tingkat Nagari.
11. Pembinaan remaja mesjid.
12. Peringatan hari besar Islam.
13. Sanitasi masjid atau mushalla.
14. Pembinaan olah raga.
15. Pembinaan lembaga adat.
16. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
17. Rehap rumah tidak layak huni.
18. Peringatan hari besar nasional.

4.4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
2. Pelatihan teknologi tepat guna.
3. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat Nagari dan BAMUS.
4. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif dan kreatif.
6. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok tani.
8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin.
10. Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta KDRT.
11. Peningkatan kapasitas kelompok pemuda.

12. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tentang paralegal.
13. Penyelenggaraan bazaar produk anak nagari.
14. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana.
15. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4.4.5 Kejadian Bencana

1. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak terduga.
2. Tanggap darurat bencana.
3. Penanggulangan bencana alam.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI, PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari, harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan empat bidang kegiatan Nagari, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Kamang Hilia dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1 VISI NAGARI

Visi merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Kamang Hilia sehingga 6 (enam) tahun ke depan Nagari Kamang Hilia mengalami suatu perubahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu, maka dirumuskan visi Nagari Kamang Hilia 6 (enam) tahun kedepan, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA NAGARI KAMANG HILIA NAN MANDIRI DAN MADANI
MELALUI NAGARI MEMBANGUN ”**

4. Mandiri, mengandung pengertian bahwa masyarakat Nagari Kamang Hilia mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada potensi keunggulan lokal.

5. **Masyarakat Madani**, mengandung makna masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun berbudaya tinggi, baik terhadap sesama manusia atau dengan alam sekitarnya dengan mengacu kepada nilai-nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
6. **Nagari Membangun**, dengan pengertian bahwa menempatkan Nagari sebagai subyek pembangunan melalui pengakuan atas hak asal usul Nagari (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Nagari (subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama pengaturan Nagari, dengan menitik beratkan pembangunan manusianya.

4.3 MISI

8. **Menciptakan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih** berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. **Mengembangkan surau dan mesjid berorientasi mutu**, sehingga surau berkembang menjadi pusat layanan unggulan yang menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas.
10. **Mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan** bagi anak Nagari serta mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal menuju Kamang Hilia sebagai Nagari Pendidikan.
11. **Melaksanakan pemberdayaan masyarakat** strategi 3 (tiga) daya :
 - d) Pengembangan Lumbung Ekonomi Rakyat, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat nagari sesuai potensi ekonomi nagari dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, peternakan, home industry, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, serta pariwisata, melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
 - e) Penguatan Jaring Komunitas Wiranagari, yaitu penguatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat nagari dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan nagari sehingga muncul Sumber daya manusia yang tangguh.

f) Pengembangan lingkar Budaya Nagari, yaitu pengembangan budaya, tradisi, dan kearifan lokal sebagai pengikat solidaritas dan kegotongroyongan dalam seluruh sektor kehidupan Nagari.

12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis

Nagari secara berkesinambungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian Nagari berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam upaya menciptakan keseimbangan alam.

13. Meningkatkan pelestarian kerukunan kehidupan bernagari sesuai falsafah “*ka mudiak sa antak galah, ka hilia sarangkuah dayuang, sasuai lahie jo bathin, sasuai muluik jo hati*”.

14. Mengembangkan jaringan kemitraaan Nagari dengan lembaga pemerintahan lainnya, organisasi perantau, dan mendorong peningkatan Kerjasama Antar Nagari serta lembaga profit dan non profit lainnya.

4.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Arah kebijakan pembangunan Nagari adalah hasil dari pengkajian secara komprehensif terhadap potensi dan masalah Nagari, isu strategis Nagari/Kabupaten/Provinsi/Nasional, visi, misi dan strategi pembangunan Nagari yang akan menghasilkan program dan kegiatan prioritas bagi Nagari untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kemandirian Nagari Kamang Hilia.

Arah kebijakan umum Nagari Kamang Hilia juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Nagari untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum Nagari pada RPJM Nagari ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Agam tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016- 2021.

4.4.1 Arah Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 10) Penguatan tata kelola pemerintahan nagari;
- 11) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari;
- 12) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan nagari;
- 13) Peningkatan akses data dan informasi serta komunikasi publik yang akurat dan terkini;
- 14) Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nagari;
- 15) Peningkatan kualitas produk hukum nagari;
- 16) Optimalisasi pelayanan masyarakat dengan mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

- 17) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- 18) Penegasan tapal batas nagari.

4.4.2 Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

- 7) Peningkatan pembangunan berbasis kewilayah dan pemberdayaan masyarakat.
- 8)

4.4.3 Arah Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.4.4 Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.4 Proritas Rencana Program Pembangunan Nagari

Kebijakan pembangunan akan dilaksanakan selama 6 tahun kedepan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

4.4.6 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

13. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Nagari.
14. Kegiatan penunjang operasional Pemerintahan Nagari.
15. Kegiatan penunjang operasional Bamus Nagari.
16. Kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari.
17. Kegiatan pendataan Nagari.
18. Kegiatan Penyusunan tata ruang Nagari.
19. Penyelenggaraan musyawarah Nagari.
20. Kegiatan pengelolaan informasi Nagari.
21. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari.
22. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Nagari.
23. Penyelenggaraan kerjasama antar nagari.
24. Pembangunan sarana prasarana kantor pemerintahan Nagari.

4.4.7 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Nagari.

4.4.7.1 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Nagari.

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari antar jorong dan jalan lingkung (pembukaan dan pengerasan).
- 2) Peningkatan jalan nagari antar jorong (pengecoran/rabat beton)
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana jalan nagari berupa rambu-rambu, penunjuk jalan serta lampu jalan.

- 4) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan, yaitu gorong-gorong dan plat deker.
- 5) Kegiatan perambahan jalan nagari.
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari ke wilayah pertanian.
- 7) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan irigasi tersier.
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga dan lapangan nagari.

4.4.7.2 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan.

- 1) Pemasangan jaringan pipa dari sumber air bersih ke penampungan dan ke kran umum.
- 2) Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan bak penampungan dan penyaringan.
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sumur serta sumber mata air lainnya.
- 4) Pemasangan jaringan dan pemeliharaan dari penampungan ke rumah penduduk.
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air/drainase.
- 6) Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
- 7) Pendirian pengelolaan sampah.
- 8) Pendirian bank sampah nagari.
- 9) Pembangunan dan atau pemeliharaan gedung posyandu, poskesri dan polindes.
- 10) Pengadaan alat kesehatan, APE serta pendukung lainnya.
- 11) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- 12) Pembinaan kesehatan masyarakat.
- 13) Program kesehatan penduduk miskin.
- 14) program peningkatan kesehatan anak balita.
- 15) Program perbaikan gizi masyarakat.

4.4.7.3 Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

12. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.
13. Bantuan transportasi pendidik/guru PAUD/TK non PNS.
14. Peningkatan kapasitas pendidik PAUD.
15. Pembangunan taman bacaan masyarakat/perpustakaan nagari dan jorong.

16. Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan seperti buku dan ruang baca.
17. Biaya pengelolaan taman bacaan.
18. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan masyarakat.
19. Pelaksanaan program life skill bagi masyarakat termasuk masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.
20. Pengembangan sanggar seni dan budaya dengan pengadaan sarana dan prasarana kesenian tradisional.
21. Pemberian beasiswa bagi anak keluarga kurang mampu yang tidak memperoleh beasiswa melalui KIS dan beasiswa lainnya.
22. Pemeliharaan cagar budaya dan situs sejarah nagari.

4.4.7.4 Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.

13. Pengelolaan pasar nagari.
14. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar nagari.
15. Pengembangan BUMNAG.
16. Peningkatan kapasitas pengelola BUMNAG.
17. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan nagari.
18. Pengembangan kebun bibit nagari.
19. Pengelolaan usaha hutan nagari.
20. Pengembangan dan pemeliharaan ikan serta pemberian.
21. Pengembangan usaha ternak masyarakat.
22. Pengembangan, pembangunan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan instalasi biogas.
23. Pembangunan showroom/wisma produk nagari.
24. Pembentukan dan pengembangan objek wisata nagari.

4.4.7.5 Sub Bidang pelestarian lingkungan hidup.

7. Pembersihan daerah aliran sungai dari semak dan sampah.
8. Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Agam dan Batang Tangalau.
9. Pembuatan terasering serta penanaman disepanjang aliran sungai batang agam dan tangalau serta banda.
10. Penanaman dan pemeliharaan hutan.
11. Perlindungan mata air.
12. Pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai dan lingkungan.

4.4.8 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

19. Pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan.
20. Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan.
21. Pembiayaan kegiatan yang direncanakan oleh lembaga.
22. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
23. Pembinaan kegiatan bidang agama.
24. Mewujudkan gerakan nagari madani
25. Perbaikan mesjid dan mushalla.
26. Pembayaran belanja jasa imam dan gharin mushalla.
27. Pembayaran jasa guru TPA/MDTA.
28. Pelaksanaan MTQ tingkat Nagari.
29. Pembinaan remaja mesjid.
30. Peringatan hari besar Islam.
31. Sanitasi masjid atau mushalla.
32. Pembinaan olah raga.
33. Pembinaan lembaga adat.
34. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
35. Rehap rumah tidak layak huni.
36. Peringatan hari besar nasional.

4.4.9 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

16. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
17. Pelatihan teknologi tepat guna.
18. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat Nagari dan BAMUS.
19. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
20. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif dan kreatif.
21. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan.
22. Peningkatan kapasitas kelompok tani.
23. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kurang mampu.
24. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin.
25. Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta KDRT.
26. Peningkatan kapasitas kelompok pemuda.
27. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat tentang paralegal.
28. Penyelenggaraan bazaar produk anak nagari.

29. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana.
30. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4.4.10 Kejadian Bencana

4. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak terduga.
5. Tanggap darurat bencana.
6. Penanggulangan bencana alam.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Nagari.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Wali Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nag tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Walinagari silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

